WSBAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu atau kelompok. Kinerja bisa diketahui jika individu atau kelompok mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Penelitian ini menjelaskan mengenai kinerja BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir.

Kinerja BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah di sini yang dimaksud adalah untuk menggambarkan mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana banjir. Tingkat pencapaian tersebut apakah sesuai dengan sasaran dan tujuan, misi dan visi BPBD Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir. Tingkat pencapaian tidak akan berjalan tanpa adanya sasaran dan tujuan, misi dan visi karena tidak ada tolak ukurnya, karena sebagai instansi pemerintahan sudah jelas mempunyai kewenangan untuk mengurus seluruh bidang tugas pemerintahan khususnya bidang tugas kebencanaan yang tujuan akhirnya untuk mensejahterakan masyarakat.

Tingkat pencapaian mengenai kinerja BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah dalam penanggulangan bencana banjir dapat dilihat dari hasil kerja BPBD Kabupaten Bandung itu sendiri. Hasil kerja sangat penting diketahui oleh instansi pemerintahan dalam hal ini BPBD Kabupaten Bandung apakah pelaksanaan kegiatan di wilayah Kecamatan Baleendah yaitu penanggulangan bencana banjir sudah berjalan baik atau belum. Kegiatan penanggulangan

bencana banjir merupakan kegiatan yang sangat penting terciptanya keberhasilah dalam penanggulangannya sebab menyangkut jiwa, harta masyarakat di wilayah Kecamatan Baleendah yang sering terkena dampak bencana banjir. Indikator-indikator dalam penelitian mengenai kinerja BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah dalam penanggulangan bencana banjir terdiri dari produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas. Kinerja BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah dalam penanggulangan bencana banjir, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada indikator-indikator di bawah ini :

4.1 Produktivitas BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir.

Produktivitas adalah Rasio antara *input* dengan *output,* yang merupakan perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh dengan jumlah kerja yang dikeluarkan. Produktivitas dikatakan tinggi jika hasil yang diperoleh lebih besar dari pada sumber tenaga kerja yang dipergunakan dan sebaliknya. Produktivitas BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupeten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir tentunya sangat dibutuhkan, sebab lingkungan hidup di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung harus menjadi perhatian yang serius dari pihak masyarakat di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupeten Bandung yang terdiri dari aparatur Pemerintahan, swasta dan masyarakat itu sendiri dalam hal pengelolaan lingkungan hidup agar tidak terjadi bancana banjir khususnya di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan kewajiban setiap masyarakat di dalam suatu wilayah dan merupakan sesuatu yang sangat penting. Makhluk hidup tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, meskipun lingkungan bersifat mendukung atau menyokong kehidupan makhluk hidup, namun perlu diingat bahwa tidak semua lingkungan di muka bumi ini memiliki keadaan yang ideal untuk kehidupan makhluk hidup.

Lingkungan hidup mempunyai keterbatasan, baik dalam hal kualitas maupun kuantitasnya. Lingkungan hidup dapat mengalami penurunan kualitas dan penurunan kuantitas. Penurunan kualitas dan kuantitas lingkungan ini menyebabkan kondisi lingkungan kurang atau tidak dapat berfungsi lagi untuk mendukung kehidupan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kerusakan lingkungan hidup dapat disebabkan oleh proses alam dan karena aktivitas manusia.

Kerusakan lingkungan dapat menyebabkan bencana, salah satunya bencana banjir yang terjadi di wilayah Kecamatan Baleendah selain akibat faktor alam juga dipengaruhi oleh manusia. Kondisi tersebut tentunya membutuhkan perhatian yang sangat serius dari pihak khususnya pemerintah sebagai yang pemimpin di wilayah tersebut. Pemerintah sebagai lembaga pelayanan publik tentunya harus melakukan upaya-upaya dalam penanggulangan bencana dalam hal ini bencana banjir perlu penanganan dan penanggulanga yang serius sebab menyangkut jiwa dan harta warga masyarakat sekitar.

BPBD Kabupaten Bandung sebagai instansi yang khusus menangani bencana-bencana di wilayah Kabupaten Bandung, dalam penelitian ini fokus dalam penangulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah. Keberhasilan pelaksanaan penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah sangat ditentukan oleh produktivitas dari BPBD Kabupaten Bandung. Suatu instansi pemerintah sangat diperlukan adanya produktivitas kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Produktivitas merupakan suatu akibat dari persyaratan kerja yang harus dipenuhi oleh aparat untuk memperoleh hasil maksimal dimana dalam pelaksanaannya.

Produktivitas BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah dalam penanggulangan bencana banjir dapat dikatakan cukup baik. Kondisi tersebut dilihat dari terpasilitasinya peralatan kantor dan bantuan-bantuan untuk korban banjir serta kejelasan waktu penanggulangan bencana banjir, meskipun memiliki kendala yaitu kurangnya alokasi dana serta jumlah SDM BPBD Kabupaten Bandung yang kurang di setiap bidang-bidangnya, tetapi BPBD Kabupaten Bandung tetap memaksimalkan menjalankan fungsi-fungsi yaitu komando, koordinasi dan pelaksanaan bersama pihak-pihak terkait dalam penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah. Produktivitas BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah dalam penanggulangan bencana banjir, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari *input* dan *output* sebagai berikut :

4.1.1 *Input* BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir.

Input atau masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan berjalan untuk menghasilkan keluaran. *Input* merupakan indikator awal penentuan keberhasilan pelaksanaan suatu program-program dalam hal ini program-program instansi pemerintan. Proses pelaksanaan dari visi dan misi melalui program-program memerlukan *input* yang banyak agar sasaran dan tujuan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah di tetapkan. *Input* itu sendiri terdiri dari jumlah dana yang dibutuhkan/ sumber daya finansial, jumlah pegawai yang dibutuhkan atau sumber daya manusia, jumlah infrastruktur yang dibutuhkan dan jumlah waktu yang digunakan atau sumber daya waktu.

Indikator-indikator yang ada di dalam *input*, merupakan aspek penentu untuk pencapaian segala kebutuhan agar pelaksanaan kegiatan dan program instansi pemerintahan dalam hal ini BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah dalam penanggulangan bencana banjir dapat berjalan. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana banjir tersebut dalam rangka menghasilkan keluaran atau hasil.

Kegiatan BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah dalam penanggulangan bencana banjir khususnya unsur pelaksana yang terdiri dari bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang kedaruratan dan logistik, bidang rehabilitasi dan rekonstruksi memiliki *input*. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bandung yang mengatakan :

> “Ya....mengenai sumber dana untuk penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung belum mencukupi. Dana BPBD Kabupaten Bandung

> selama ini bersumber pada APBN Provinsi Jawa Barat dan Pusat yang tentunya dana tersebut terbatas untuk penanggulangan bencana seperti banjir" (Ccp, 2/5/2012).

Pernyataan tersebut di pertegas oleh aparatur Dinas Sosial Kabupaten Bandung, hasil wawancara dengan Kepala Seksi Perlindungan Korban Bencana alam dan sosial beliau mengatakan

> "mengenai soal dana bantuan memang kita akui bahwa dalam pelaksanaan penanggulangan bencana khususnya banjir terkendala oleh terbatasnya alokasi dana bantuan karena belum rampungnya peraturan daerah mengenai kebencanaan di Kabupaten Bandung, tapi kita berusaha untuk tetap memaksimalkan akan kekurangan tersebut, terutama bantuan-bantuan untuk korban bencana banjir" (Ysr, 04/062012)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut memang jelas bahwa dana untuk kebencanaan belum mencukupi di tambah bencana banjir yang terjadi di wilayah Kecamatan Baleendah sering terjadi dan terulang sehingga membutuhkan dana yang besar untuk penanggulangannya. Keterbatasan dana yang ada di BPBD Kabupaten Bandung diakibatkan tidak adanya peraturan daerah Kabupaten Bandung yang khusus menangani kebencanaan untuk Kabupaten Bandung. Keterbatasan dana tersebut mengakibatkan bantuan-bantuan terhadap korban banjir kurang berjalan dengan lancar. Dana yang dikucurkan untuk korban banjir yang bersumber dari ABPD Provinsi Jawa Barat dan Pusat. Dana dihitung berdasarkan jumlah hari dalam penanganan penanggulangan kebencanaan banjir.

Dana untuk bantuan kebencanaan banjir menurut Kabid Kedaruratan dan logistik beliau mengatakan :

> "mengenai dana tidak bisa ditentukan karena pengalokasian dana harus dengan menghitung jumlah pengungsi, jumlah material yang dibutuhkan. Pengalokasian dana untuk bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah hitungannya perlokasi sekitar Rp. 10.000.000 s.d. Rp.

20.000.000 untuk wilayah Kecamatan Baleendah. Dana yang di kucurkan tersebut untuk keperluan selama 7 hari selama" (Ccp, 02/05/2012).

Melihat kondisi tersebut BPBD Kabupaten Bandung tetap memaksimalkan akan kekurangan tersebut. Menurut Kepala Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, berpendapat "dana yang ada dicukup-cukupkan untuk memenuhi akan kebutuhan korban banjir tetapi kita tetap ke lapangan untuk melaksanakan tugas kita seperti peringatan dini, pencegahan sesuai bidang kita" (Pdn, 28/052012).

Berikut jumlah korban bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Jumlah Korban yang terkena bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleeendah Kabupaten Bandung Tahun 2012

NO	KELURAHAN	JUMLAH
1	Kelurahan Baleendah	734 KK - 2.052 jiwa
2	Kelurahan Andir	2.787 KK - 8.034 jiwa
Jumlah		3.521 KK - 10.086 jiwa

Sumber : BPBD Kabupaten Bandung 2012

Dana yang dikucurkan untuk penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung apabila dilihat dari jumlah korban bencana banjir yang ada di tabel 4.1 dengan jumlah korban banjir yang ada di Kelurahan Baleendah yang berjumlah 737 KK-2.52 jiwa dan Kelurahan Andir 2.787 KK- 8.034 jiwa. Kondisi tersebut tentunya dana tersebut belum dapat mencukupi kebutuhan untuk seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Baleendah yang terkena dampak bencana banjir yang tentunya untuk keperluan logistik dan materi-materi yang dibutuhkan untuk korban bencana banjir.

Ketidakcukupan dana tersebut diakibatkan karena sering terjadinya bencana banjir di Kecamatan Baleendah sehingga dana yang ada sekarang semaksimal mungkin dicukup-cukupkan bila perlu menyisihkan dari dana-dana yang ada.

Penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dilaksanakan secara koordinasi, jadi BPBD Kabupaten Bandung tidak sendiri dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir melainkan bekerja sama dan berkoordinasi bersama instansi-instansi yang ada di Kabupaten Bandung seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pertasih, Dinas Perhubungan, Dinas PU dan Binamarga, Kecamatan Baleendah, PMI, ABRI, Polisi, dan LMS seperti Baraya Bandung, Garda Caah, Forum Kedaruratan Dini Masyarakat (FKDM) dan TAGANA (Taruna Siaga Bencana), tagana adalah relawan yang berkordinasi dengan camat tagana di kecamatan, tagana sebagai binaan Dinsos Kabupaten Bandung yang ditempatkan di Kecamatan-Kecamatan. TRC (Tim Reaksi Cepat) yang merupakan binaan dari BPBD Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana banjir.

Penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah meskipun dalam pelaksanaannya berkoordinasi dan bekerja sama, bila dilihat sangat mungkin bisa terpenuhi, tetapi kebutuhan masyarakat tersebut sangat banyak. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat kampung Ciunteung Kelurahan Baleendah, kampung Ciputat, kampung Cigosol, kampung Jambatan dan kampung Kulalet Kelurahan Andir, masih banyak warga yang belum kebagian bantuan dari pihak pemerintah dalam hal ini instansi-instansi pelaksana penanggulangan bencana banjir.

Jumlah peralatan tentunya mempengaruhi akan kualitas kinerja dari instansi/ SKPD seperti BPBD Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana khususnya bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah. Peralatan yang mendukung tentunya membuat semua kegiatan BPBD Kabupaten Bandung dalam melaksanakan fungsi yang diantaranya pengkomandoan, pengkoordinasian dan pelaksanaan penanggulangan bencana dapat berjalan lancar. Jumlah peralatan yang berada di kantor BPBD Kabupaten Bandung dapat di lihat pada tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Jumlah Peralatan Kantor BPBD Kabupaten Bandung Tahun 2012

NO	JENIS PERALATAN	VOLUME	SATUAN
1	Papan Nama Instansi	1	Buah
2	Lemari Kayu	3	Buah
3	Komputer PC	7	Buah
4	*Harddisk/ Flashdisk*	1	Buah
5	Printer	4	Buah
6	Mesin Tik	3	Buah
7	Lemari Pakaian	1	Buah
8	Lemari Arsip Pintu Kaca	5	Buah
9	Lemari Arsip Pintu Ayun	6	Buah
10	Lemari Arsip Pintu Setengah	1	Buah
11	Brankas	1	Buah
12	*Filling Cabinet*	13	Buah
13	*White Board*	6	Buah
14	Televisi	2	Buah
15	Kulkas	2	Buah
16	Wacuum Cleaner	1	Buah
17	Mesin Babat Rumput	1	Buah
18	*AC*	2	Buah
19	*Vitrase*/ Karpet	150	Meter
20	*Notebook/ Laptop*	2	Buah
21	Scaner	2	Buah
22	UPS/ *Stabilizer*	2	Buah
23	*Infocus*	2	Buah
24	Layar *Infocus*	2	Buah

25	Kamera	1	Buah
26	*Handycam*	1	Buah
27	Meja Direktur	1	Buah
28	Meja Sekretaris	1	Buah
29	Meja Kerja 1 Biro	3	Buah
30	Meja Kerja 2 L 2 P	9	Buah
31	Meja Setengah Biro	30	Buah
32	Meja Rapat	1	Buah
33	Kursi Putar Direktur	1	Buah
34	Kursi Putar Sekretaris	1	Buah
35	Kursi Putar Bidang	3	Buah
36	Kursi Putar Kasubag/ Kasi	9	Buah
37	Kursi Rapat	22	Buah
38	Tempat Tidur	1	Buah
38	Sofa	6	Buah
40	Kursi Kerja	10	Buah
41	Kursi Chitose/ Rapat	30	Buah
42	Rak Buku	7	Buah
43	Rak TV	2	Buah
44	Meja Komputer	4	Buah
45	Meja Telepon	1	Buah
46	Meja Tamu	1	Set

Sumber : BPBD Kabupaten Bandung 2012

Berdasarkan tabel 4.2 jumlah dari peralatan kantor BPBD Kabupaten Bandung cukup menunjang dalam melaksanakan kegiatan administrai perkantoran. Ketersediaan peralatan-peralatan tersebut tentunya mempengaruhi akan kualitas kinerja BPBD Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bancana, khususnya untuk melaksanakan fungsinya diantaranya : Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan.

Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas. Pelaksanaan Pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepala sub unit kerja di lingkungan Badan. Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas. Pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat. Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai di lingkungan Badan dan Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

Terfasilitasinya perlatan-peralatan kantor yang ada di BPBD Kabupaten Bandung, sangat menunjang dalam melaksanakan pekerjaan yang ada di dalam kantor BPBD Kabupaten Bandung. Peralatan BPBD Kabupaten Bandung selain untuk administasi perkantoran, peralatan lainnya yang digunakan di lapangan yakni untuk penanggulangan bencana khususnya bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah. Jumlah peralatan dalam kegiatan penanggulangan kebencanaan merupakan faktor penting. Peralatan digunakan untuk membantu dan mendukung akan keperluan-keperluan korban-korban bencana banjir. Jumlah peralatan yang dimiliki BPBD Kabupaten Bandung untuk bencana banjir dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.3
Data Kebutuhan Stok Logistik Untuk Penanggulangan Bencana Banjir Di Wilayah Baleeendah Kabupaten Bandung

NO	JENIS	VOLUME	SATUAN
1	Mobil Dapur Lapangan	1	Unit
2	Mobil Operasional Lapangan	1	Unit
3	*Handy Talky*	20	Unit
4	*Water Treatment*	1	Unit
5	Sepatu Boot	500	Buah
6	Jas Hujan	1.000	Buah

7	Tali *Rescue*	500	Meter
8	*Head Lamp* (Senter Tempel di Helm)	500	Unit
9	*Family Kits*	500	Set
10	Terpal	300	Buah
11	Tenda Pleton	5	Set
12	Rompi Pelampung	100	Buah
13	*Ring Buoy*	100	Buah
14	Perahu Karet	10	Buah
15	Mesin Perahu	5	Buah
16	Genset	5	Set
17	Mesin Penyedot Lumpur	5	Set
18	*Slubber*	500	Buah
19	Troli	50	Buah
20	Karung Plastik	5.000	Lembar
21	Kids Ware	500	Set
22	Beras	10.000	Kg
23	Mie *Instant*	5.000	Karton
24	Sarden	15.000	Kaleng
25	Minyak Goreng	500	Liter
26	Susu Bayi	500	500 Gram
27	Makanan Siap Saji	5.000	Kaleng

Sumber : BPBD Kabupaten Bandung 2012

Melihat tabel 4.3 dapat dijelaskan bahwa dengan jumlah peralatan atau logistik yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Bandung untuk wilayah Kecamatan Baleendah sudah mencukupi untuk kegiatan penanggulangan bencana banjir dan bantuan bagi korban bencana banjir. Jumlah peralatan maupun logistik bisa bertambah jumlahnya sesuai dengan kebutuhan korban bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah.

Pelaksanaan penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah, dengan memadainya akan peralatan dan logistik, tidak akan berjakan secara maksimal apabila tidak di dukung oleh SDM yang memadai dalam proses pelaksanaanya. SDM mempunyai peranan penting dalam proses pelaksanaan penanggulangan bencana banjir, agar berjalan secara efektif dan tepat sasaran serta sesuai dengan tujuan yang telah di tetapkan. Kehandalan SDM BPBD

Kabupaten Bandung mempengaruhi terhadap produktivitas kinerja instansi pemerintahan. Jumlah aparatur BPBD Kabupaten Bandung berdasarkan hasil penelitian sangat kurang. Jumlah aparatur BPBD Kabupaten Bandung dapat di lihat pada tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel 4.4
Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten Bandung

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	4
2	S1	14
3	D3	2
4	SMA	17
Jumlah		**37**

Sumber : BPBD Kabupaten Bandung 2012

Berdasarkan Tabel 4.4 jumlah SDM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung tahun 2012, Aparatur BPBD Kabupaten Bandung berjumlah 37 Orang. Aparatur BPBD Kabupaten Bandung mayoritas sarjana. SDM. Penanggulangan Bencana yang meliputi kegiatan penetapan rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggapan darurat dan pasca bencana, evaluasi dan pelaporan memerlukan SDM yang tinggi, meskipun begitu jumlah tersebut tentunya dalam penanggulangan bencana banjir kurang memadai dalam penanggulangan bencana banjir bila di kaitkan dengan jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Baleendah yang terdapat pada tabel 4.1 yang mencapai 3.521 KK - 10.086 jiwa. Artinya jumlah aparatur BPBD Kabupaten Bandung perlu ditambah jumlah aparaturnya.

Aparatur yang ada di BPBD Kabupaten Bandung yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana khususnya bencana banjir, di lihat dari tabel 4.4 jumlah aparatur BPBD Kabupaten Bandung sangat kurang. Berdasarkan wawancara bersama kepala bidang kedaruratan dan logistik BPBD Kabupaten Bandung menyatakan :

> "mengenai jumlah aparatur BPBD Kabupaten bandung dalam 1 bidang membawahi 2 seksi di bawahnya sehingga hanya ada 3 aparatur dalam 1 bidang. Kondisi tersebut sangat kurang apabila dalam suatu instansi yang mempunyai tugas dalam penanganan penanggulangan kebencanaan. Aparatur di BPBD Kabupaten Bandung berdasarkan wawancara idealnya terdiri dari 4-6 orang Kepala Seksi dalam satu bidang dan membawahi 20-25 orang staf per Kepala Bidang" (Ccp, 21/05/2012).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa jumlah aparatur BPBD Kaupaten Bandung kurang mencukupi dan perlu di tambah akan jumlah aparaturnya. Tercapainya jumlah ideal aparatur BPBD Kabupaten Bandung tentunya dapat memaksimalkan akan semua kegiatan-kegiatan kebencanaan khususnya banjir unutk wilayah Kecamatan Baleendah"

Faktor *input* selain dana dan SDM, yang mempengaruhi produktivitas BPBD Kabupaten Bandung ialah mengenai Sumber Daya Waktu atau jumlah waktu. Jumlah waktu menentukan ketepatan dan kejelasan akan kegiatan-kegiatan penanggulagan bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah. Berdasarkan wawancara bersama kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, beliau menyatakan "waktu yang digunakan 1x24 jam, kita kebanyakan 1x6 jam rutin sesuai laporan" (Pdn, 28/05/2012). Pernyataan tersebut sama halnya menurut menurut kepala bidang kedaruratan dan logistik BPBD Kabupaten Bandung,

> "Jumlah waktu dalam penanggulangan bencana banjir adalah 3, 7, 10 hari dan berlanjut waktu penanganannya tergantung lama dari bencana banjir

> yang terjadi di Kecamatan Baleendah. Jumlah waktu evakuasi sekitar 6 jam-1 hari sudah dapat tertangani sedangkan jumlah waktu tanggap darurat standarnya 3-7 hari" (Ccp, 21/05/2012).

Melihat hasil wawancara tersebut untuk jumlah waktu dalam penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah BPBD Kabupaten Bandung sudah memadai dan bisa dilihat sangat cepat dalam penanggulangannya bencana banjir. *Input* yang dihasilkan oleh BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah dalam penanggulangan bencana banjir adalah bahwa *input* dari BPBD Kabupaten Bandung kekurangan jumlah aparatur di bidang-bidang seperti bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekontruksi. dana untuk penanggulangan bencana banjir juga kurang memadai atau memenuhi akan pelaksanaan penanggulangan bencana banjir sehingga berpengaruh terhadap logistik dan bantuan terhadap korban bencana banjir, sedangkan jumlah waktu dan peralatan kantor dalam penanggulangan bencana banjir sudah mencukupi dan memadai atau mendukung.

4.1.2 *Output* BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir.

Ouput adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegoatan yang dapat berwujud mauun tidak berwujud. *Output* yang dihasilkan oleh BPBD Kabupaten Bandung di wilayah Kecamatan Baleendah dalam penangulangan bencana banjir ialah terdiri dari bentuk fisik dan jasa atau layanan.

Jasa dalam kegiatan penanggulangan bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Bandung berdasarkan wawancara bersama kepala pencegahan dan kesiapsiagaan menurutnya :

> "kalo dari bidang saya, ya... kami melakukan sosialisasi, peringatan dini melalui radio *airbrand*, untuk kedepannya bisa lewat selebaran, atau bikin kalender agar masyarakat wilayah Kecamatan Baleendah mengetahui tentang tugas dan fungsi dalam penanggulangan bencana banjir" (Pdn, 28/05/2012).

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian untuk bidang pencegahan dan kesiapsiagan sudah melakukan jasa yang diantaranya sosialisasi dan peringatan dini di wilayah Kecamatan Baleendah. Jasa lainya yang di hasilkan oleh BPBD Kabupaten Bandung adalah berdasarkan wawancara bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik beliau menyatakan :

> "kita sudah melakukan seperti terevakuasinya, masyarakat yang terkena bencana ke tempat pengungsian, terevakuasinya 100 makanan untuk sekian jiwa bagi korban yang terkena bencana banjir. Pendistribusian bantuan tersebut diantaranya untuk kebutuhan dasar seperti : selimut, alas tidur, tenaga evakuasi dan kebutuhan pokok lainnya" (Ccp, 21/05/2012).

Pernyataan lainnnya berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi menyatakan :

> “mengenai banjir di Baleendah ini kan akibat erosi dan endapan sungai citaur sehingga terjadi banjir. bahwa untuk penanganan rehabilitasi dan rekontruksi untuk baleendah di buat selter untuk penampungan, percuma adanya rekonstruksi rumah karena banjir terus-terusan, pertama benahi dulu sungai oleh BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) agar anggaran dapat terserap dengan baik agar tidak buang-buang biaya” (Snr, 28/05/2012).

Berdasarkan penelitian di atas memang BPBD Kabupaten Bandung sudah memaksimalkan dalam penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah. Kegiatan yang BPBD Kabupaten Bandung lakukan adalah dengan adanya sosialisasi, peringatan dini, mengevakuasi korban banjir memberikan bantuan bantuan dan membuat selter untuk para pengungsi di wilayah Kecamatan Baleendah.

Kendala yang dihadapi oleh BPBD Kabupaten Bandung adalah ketika menentukan jumlah bantuan-bantuan kepada masyarakat meskipus sudah di hitung jumlahnya, pemenuhan kebutuhan bagi korban bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah, kadang-kadang melebihi apa yang sudah ditentukan seperti terlihat pada tabel 4.1 tentang jumlah korban yang terkena bencana banjir yang mencapai 10.086 dan 4.3 tentang data kebutuhan stok logistik yang seperti sepatu boot yang berjumlah 500 tentu saja sangat kurang bila dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang terkena bencana banjir.

Pemenuhan kebutuhan masyarakat sewaktu-waktu jumlah pengungsi bertambah banyak apabila luas wilayah yang terkena bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah meluas, karena bencana banjir tidak bisa ditentukan sewaktu-waktu, meskipun berdasarkan wawancara dengan aparatur-aparatur BPBB Kabupaten Bandung serta wawancara dengan Dinas Sosial selaku instansi terkait mereka "mengatakan bahwa wilayah Kecamatan Baleendah itu bukan merupakan bencana karena bisa diprediksi kapan terjadinya, lebih disebut sebagai musibah" (Ccp, 21/05/2012) dan (Ysr, 04/06/2012). Bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah meskipun di sebut musibah tetapi berdasarkan ketentuan peaturan perundang-undangan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, dikatakan bencana, jadi dalam pelaksanaannya tetap menjalankan sesuai dengan peraturan yang ada.

Kendala dalam pelaksanaan penanggulangan bencaana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah, dalam mendistribusikan bantuan logistik yang dikatakan di atas tadi, juga bantuan rekontruksi dan rehabilitasi untuk perbaikan rumah warga yang rusak akibat bencana banjir mengalami kendala-kendala. Kendala-kendala yang dihadapai oleh BPBD Kabupaten Bandung adalah terbatasnya dana yang dimiliki oleh instansi BPBD Kabupaten Bandung karena belum rampungnya peraturan daerah Kabupaten Bandung tentang penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Bandung. BPBD Kabupaten Bandung bersama dengan instansi-instansi terkait serta LSM-LSM setempat secara maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Baleendah meskipun belum

rampungnya peraturan daerah tentang penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Bandung.

Pelayanan yang diberikan BPBD Kabupaten Bandung selain dalam bentuk jasa, bentuk fisik pun mereka berikan untuk penanggulangan bencana banjir, seperti membuat tanggul-tanggul di bantaran sungai citarum, cisangkuy, menitipkan atau menyimpan perahu-perahu dan tenda kepada masyarakat wilayah Kecamatan Baleendah. Keperluan-keperluan logistik lainnya BPBD Kabupaten Bandung menyimpan logistik-logistik lainnya di kantor Kecamatan Baleendah sebagian dari instansi-instansi terkait dalam penanggulangan bencana banjir.

Bentuk fisik lainnya adalah pemberian *Handy Talky* tujuannya agar setiap bencana banjir terjadi atau informasi-informasi tentang kebencanaan antara BPBD Kabupaten Bandung dengan LSM-LSM setempat seperti Baraya Bandung, Garga Caah, TAGANA, FKDM dan lainnya dapat berkomunikasi langsung. Pemberian *Handy Talky* membuktikan sesigapan dan keseriusan BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir.

Penempatan alat-alat di atas tadi oleh BPBD Kabupaten Bandung agar ketika terjadinya bencana banjir, meskiun sudah bisa terprediksi, tetapi debit air sewaktu-waktu bisa melebihi yang sudah diprediksikan, sehingga masyarakat bisa secara cepat menyelamatkan diri meraka beserta harta benda. Penempatan alat-alat/ logistik keperluan bencana tentunya sangat membantu warga masyarakat yang terkena banjir sedikitnya bisa meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak

terduga sebelumnya. Strategi tersebut berdasarkan tercapainya target-target dalam penanggulangan bencana.

Target dari BPBD Kabupaten Bandung tahun 2011 dalam rangka penanggulangan bencana khususnya bencana banjir di Kabupaten Bandung yang diantaranya :

a) Tersedianya peta rawan bencana di 267 desa, 9 kelurahan dalam rangka peningkatan pengurangan bencana di Kabupaten Bandung, dengan indikatornya daerah yang rawan bencana
b) Meningkatkan pembinaan tehnik terhadap masyarakat dalam rangka peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengantisipasi bencana di setiap wilayah masing-masing, dengan indikatornya masyarakat yang mengikuti pembinaan.
c) Terwujudnya koordinasi di bidang tanggap darurat, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat penanggulangan bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana dengan unit kerja/ instansi/ lembaga lain yang diantaranya :
    1) Data –data peta rawan bencana
    2) Personil tanggap darurat
    3) Data korban bencana
    4) Kerugian korban bencana
    5) Kondisi Pasca bencana

Output yang dihasilkan oleh BPBD Kabupaten Bandung di wilayah Kecamatan Baleendah dalam penangulangan bencana banjir, meskipun mengalami kerurangan jumlah aparatur dan dana, tetapi BPBD Kabupaten Bandung secara maksimal melaksanakan pemberian bantuan dan kebutuhan serta pembinaan atau pendidikan terhadap korban bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Kondisi tersebut tentunya belum sepenuhnya korban bencana banjir terpenuhi akan keperluan dan kebutuhannya dan BPBD Kabupaten Bandung tetap melaksanaan kordinasi, komando serta pelaksanaan penanggulangan bencana banjir bersama pihak-pihak yang terkait sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

4.2 Kualitas layanan BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir.

Kualitas layanan adalah pelayanan prima yang diberikan BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penangulangan bencana banjir banjir. Kualitas layanan publik menjadi fokus yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik masih menjadi persoalan yang perlu memperoleh perhatian dan penyelesaian yang komprehensif. Penyelenggaraan pelayan publik. Banyaknya tuntutan yang harus dijalankan dalam pelayanan publik sebagai tanda ketidakpuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat terus mengalami pembaruan, baik dari sisi paradigma maupun format pelayanannya. Peningkatan kualitas pelayan publik tersebut seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dan perubahan di dalam pemerintahan itu sendiri, karena setiap manusia pada dasarnya membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia.

Kualitas pelayanan BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah dalam penanggulangan bencana banjir, pelayanan tersebut mulai dari pra bencana adanya pencegahan dan kesiapsiagaan, ketika bencana adanya kedaruratan dan bantuan logistik dan sesudah bencana adanya rekontruksi dan rehabilitasi. Pelaksanaan penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah mulai dari pra bencana, ketika bencana terjadi dan pasca bencana akan berhasil bila kualitas pelayanan yang diberikan mampu memenuhi kebutuhan warga masyarakat Kecamatan Baleendah yang terkena dampak bencana banjir.

Kualitas layanan yang di berikan oleh BPBD Kabupaten Bandung secara keseluruahn sudah cukup baik hal tersebut terlihat dengan adanya fasilitas-fasilitas/ ternologi pendukung seperti radio airbrand, *website*, SMS *center* dan *Handy Tolky*, sipat keterbukaan, perhatian terhadap masyarakat, adanya pendidikan dan sosialisasi. Fasilitas yang kurang mendukung adalah gedung BPBD Kabupaten Bandung yang kurang luas, serta gedung pengungsian yang kurang memadai serta pengetahuan terhadap lokasi secara keseluruahan kurang mengetahui secara menyeluruh, tetapi BPBD Kabupaten Bandung untuk

meminimalisir dengan adanya diklat tiap tahun dan koordinasi serta pengkomandoan baik dengan SKPD maupun LSM dan masyarakat setempat sehingga dapat diminimalisir kekurangan dalam rangka menciptakan pelayanan yang berkualitas.

Terciptanya kualitas pelayanan oleh BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah dalam penanggulangan bencana banjir dapat ditentukan oleh adanya yang terdidiri dari bukti langsung yang diberikan terhadap masyarakat Kecamatan Baleendah oleh BPBD Kabupaten Bandung, kehandalan aparatur BPBD Kabupaten Bandung bersama instansi-instansi terkait dalam kegiatan penanggulangan bencana banjir, jaminan kepada korban bencana banjir akan terpenuhinya kebutuhan masyarakat Kecamatan Baleendah dan adanya empati atau kemampuan untuk memberikan perhatian kepada masyarakat Kecamatan Baleendah yang terkena bencana banjir agar merasa ada yang memperhatikan dan melindungi mereka. Kualitas layanan BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah dalam penanggulangan bencana banjir untuk lebih jelasnya dapat dilihat di bawah ini :

4.2.1 Bukti langsung BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir.

Bukti langsung adalah kemampuan BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam menunjukan kepada masyarakat akan fasilitas-fasilitas yang menunjang dalam penanggulangan bencana banjir, seperti gedung, perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan (teknologi). Pelaksanaan

pelayanan publik tentunya harus ada bukti langsung kepada masyarakat. Bukti langsung dalam kegiatan pelayanan terhadap masyarakat Kecamatan Baleendah yang terkena bencana banjir akan memperlihatkan fasilitas-fasilitas yang menunjang dalam penanggulangan bencana banjir.

Bukti langsung yang diperlihatkan dan digunakan oleh BPBD di wilayah Kecamatan Beleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir adalah dengan adanya gedung BPBD Kabupaten Bandung, tempat Pengungsian dan teknologi-teknologi atau peralatan-peralatan yang digunakan dalam penanggulangan bencana banjir. Gedung BPBD Kabupaten Bandung merupakan tempat di mana aparatur BPBD Kabupaten Bandung bekerja dalam penanganan penanggulangan bencana. Kegiatan penanggulangan bencana khususnya bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah akan berjalan dengan baik pelanyanannya apabila tempat atau gedung BPBD Kabupaten Bandung fasilitas-fasilitanya memadai dan menunjang untuk kegiatan penanggulangan bencana.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bandung menyatakan :

> "gedung yang sekarang berada di komplek pemerintahan Kabupaten Bandung, kurang memadai dan kurang luas. Kekurangan tersebut dapat kalian lihat lah terutama untuk gudang tempat penyimpanan peralatan dan logistik untuk penanggulangan bencana yang hanya berukuran 7x7 m^2 yang tentunya kurang memadai untuk penyimpanan untuk bantuan kebencanaan. Kekurangan luas bangunan dan kurang cocoknya gudang tempat penyimpanan tenda, perahu dan logistik-logistik lainnya yang masih di simpan d luar dan berantakan" (Ccp, 21/05/2012).

Berdasarkan penelitian bahwa gudang tenpat penyimpanan peralatan dan logistik yang dapat dilihat pada tabel 4.3, sangat kurang atau belum memadai hal tersebut menyebabkan peralatan-peralatan menumpuk di luar ruangan dan terlihat

berantakan seperti genset-genset yang berada di sisi lorong sehingga membuat jalan menjadi sempit, perahu karet yang ditumpuk di dalam ruangan terkesan kumuh dan berantakan terlihatnya, peralatan tenda yang di simpan menyatu dengan ruang tamu mengakibatkan gedung BPBD Kabupaten Bandung terlihat berantakan dan kurang nyaman di lihatnya.

Kondisi tersebut tentunya dapat mengurangi estetika dan kenyamanan kegiatan instansi BPBD Kabupaten Bandung. berdasarkan wawancara bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bandung beliau mengatakan :

> "Gedung BPBD Kabupaten Bandung seharusnya berada di luar Komplek Pemerintahan Kabupaten Bandung, sebab BPBD Kabupaten Bandung bisa di bilang harus tetap siaga 24 jam, karena bencana bisa datang tiba-tiba dan meraka harus tetap sigap, siaga dan cepat dalam melaksanakan kegiatannya sedangkan setiap malam gerbang komplek pemerintahan Kabupaten Bandung selalu dikunci, kami sering dobrak saja gerbangnya atau kalau penjaganya tahu meraka ga akan ngunci pintu gerbangnya" (Ccp, 21/05/2012).

Melihat kondisi tersebut hal tersebut tentunya sedikit menghambat pergerakan BPBD Kabupaten Bandung dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana banjir yang setiap waktu harus sigap 24 jam apabila sebab bencana dapat terjadi sewaktu-waktu. Gedung yang menjadi perhatian lainnya adalah gedung atau bangunan untuk pengungsian korban bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Kampung Cieunteung Kelurahan Baleendah mengatakan :

> "*kanggo* gedung pengungsian *mah tos dimaksimalkeun*, fasilitas mencukupi pengungsian *dilaksanakeun* waktu itu, *kanggo* tiap banjir. geung nu *diangge* gor baleendah, DPC PDI, Gedung juang sudah layak. luas tempat pengungsian sudah memadai *dibandikeun sareung* jumlah pengungsi kanggo cieunteung" (Mat 13/05/2012).

Berbeda dengan pendapat hasil wawancara bersama Kampung Cigosol Kelurahan Andir Kecamatan Baleendah kedua informan berpendapat sama mengatakan :

> "gedung dan bangunan yang dijadikan tempat pengungsian diantaranya Gedung Juang Baleendah, Gedung DPC PDIP Baleendah, Gor Baleendah dan Gedung Kwarcab Pramuka. Gedung-gedung yang dijadikan tempat pengungsian secara bangunan memang memadai sebab merupakan bangunan permanen, tetapi untuk mengenai fasilitas-fasilitas MCK (Mandi, Cuci dan Kakus) bahwa fasilitas yang ada di dalam gedung tempat pengungsian tersebut kurang memadai, sebab pengungsi korban bencana banjir banyak sedangkan MCK terbatas tentunya masyarakat korban bencana banjir harus bergiliran dalam menggunakan fasilitas tersebut" (Frs, 13/05/2012).

Berdaarkan hasil wawancara bahwa gedung tenpat pengungsian memang ada yang sudah memadai hal tersebut tergantung dari jumlah pengungsi untuk kampung Cieunteung Kelurahan Andir dapat dilihat pada tabel 4.1 berjumlah 2.052 jiwa sehingga menurutnya mencukupi. Untuk wilayah di Kelurahan Andir yang mencapai 8.043 jiwa sangat banyak sehingga untuk fasilitas MCK yang belum memadai keperluan para pengungsi.

Bukti langsung lainnya selain mengenai gedung, teknologi-teknologi/ peralatan-peralatan yang digunakan oleh BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah dalam penanggulangan bencana banjir. Teknologi yang digunakan oleh BPBD Kabupaten Bandung untuk sekarang ini konsentrasi terhadap teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi yang digunakan adalah Radio *airband* dengan Frequensi 11.473.50 MHz dan *Handy Tolky* , SMS *Center* dengan nomor 082129995800 dan website BPBD Kabupaten Bandung dengan alamat : http://bpbd-kabbandung.blogspot.com. Radio *airband* tersebut digunakan untuk

menyampaikan laporan harian dan situasi kepada kepala Pelaksana BPBD setempat, BPBD Provinsi Jawa Barat dan BNPB.

Radio komunikasi tersebut isinya memuat tentang Cuaca, Suhu rata-rata, kelembaban, arah angin kecepatan angin dan kondisi aktual kejadian bencana pada hari itu. *Handy Tolky* di gunakan BPBD Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana untuk berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam penangulangan bencana banjir seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PU dan Bina Marga, Dipertasih, Dinas Perhubungan, TNI, Polisi, PMI, Pramuka, TRC dan relawan atau LSM seperti TAGANA, Baraya Bandung, Garda Caah, FKDM dan lain-lain. SMS *Center* dan website tersebut di gunakan untuk lebih memudahkan masyarakat memberikan informasi saat daerahnya dilanda bencana kepada BPBD Kabupaten Bandung.

Teknologi Komunikasi dan informasi tersebut berdasarkan wawancara bersama TAGANA di wilayah Kecamatan Baleendah mengatakan : “saya belum mendapatkan inventaris peralatan komunikasi seperti *Handy Tolky* masih menunggu kiriman dari BPBD Kabupaten Bandung” (edi, 26/05/2012), tentunya ini menjadi suatu hal yang perlu di selesaikan agar setiap perkembangan atau kondisi mengenai informasi kebencanaan dapat terkomunikasikan dengan baik serta nomor sms *center* serta alamat website yang belum diketahui masyarakat Kecamatan Baleendah secara luas dan isi dari informasi yang ada di website BPBD Kabupaten Belum lengkap, kondisi ini membutuhkan sosialisasi dari BPBD Kabupaten Bandung agar warga masyarakat mengetahui dan masyarakat

tidak kebingungan dalam menyampaikan laporan informasi mengenai bencana banjir.

Teknologi informasi komunikasi sangat bermanfaat untuk berkoordinasi antara BPBD Kabupaten Bandung dengan pihak-pihak serta masyarakat, sehingga dalam proses pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan Baleendah dapat berjalan dengan lancar dan terkendali. Tercapainya informasi dan komunikasi kepada masyarakat akan dapat mempermudah BPBD Kabupaten Bandung untuk mengetahui kekurangan dalam penanggulangan bencana banjir serta dapat mengoptimalkan kinerja BPBD Kabupaten Bandung itu sendiri.

Bukti langsung yang di miliki BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir, seperti gedung perkantoran BPBD Kabupaten Bandung yang ruangan gudang tempat penyimpanan logistik kurang luas, dan gedung tempat pengungsian yang kurang lengkap akan fasilitas dan kurang nyaman, sedangkan teknologi yang digunakan seperti radio *airbrand*, *handy tolky*, cukup memadai sedangkan sms *center* dan website, masyarakat kurang begitu tahu akan adanya SMS *center* dan isi konten dari website BPBD Kabupaten Bandung kurang lengkap dan informasi yang di dalamnya perlu diperbaharui atau *update*.

4.2.2 Kehandalan BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penaanggulangan bencana banjir.

Kehandalan adalah kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan kemampuan untuk dipercaya terutama memberikan jasa secara tepat waktu, pemerataan pelayanan dan sikap yang simpatik. Kehandalan BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir sangat penting untuk menunjang akan tercapainya target atau tujuan dari berbagai kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan bencana banjir.

Kehandalan yang dimiliki BPBD Kabupaten Bandung di wilayah Kecamatan Baleendah dalam penanggulangan bencana banjir, bahwa dalam memberikan pelayanan penanggulangan bencana banjir kepada masyarakat, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bandung mengatakan :

> "kita selalu assesment berdasarkan tupoksi TRC (Tim Reaksi Cepat) ceklis di lapangan secara cepat 1x6 minimal maksimal 2x24 jam, bila tidak terlaksana/ tangani hubungannya dengan peraturan perundangan-undangan bisa di hukum 3 tahun penjara. Sekecil apapun harus terlaksana UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana" (Ccp, 21/05/2012).

Ketepatan waktu yang digunakan oleh BPBD Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir sesuai dan mematuhi pra SOP dan UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, pernyataan tersebut diperkuat berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bandung mengatakan : "waktu yang dibutuhkan minimal 1x6

jam dan maksimal 2x24 jam, kita kebanyakan 1x6 jam rutin sesuai laporan" (Pdn, 28/05/2012).

Ketepatan waktu yang diberikan BPBD di wilayah Kecamtan baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir sudah cepat. Ketepatan waktu tersebut artinya dalam hal melakukan evakuasi warga masyarakat dan pemberian bantuan serta logistik paling cepat dalam waktu 6 jam sudah bisa teratasi dan paling lama 2 hari penanganan tanggap darurat oleh BPBD Kabupaten Bandung.

Ketepatan waktu dalam penanggulangan bencana banjir tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang penanggulangan bencana, jadi jelas bahwa penanganan yang dilakukan BPBD Kabupaten Bandung kecepatan waktunya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada/ berlaku. Ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan tersebut dapat kena sangsi hukuman 3 tahun penjara. Berdasarkan hasil wawancara Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bandung mengatakan "bahwa sekecil apapun bencana banjir kami BPBD Kabupaten Bandung bersama instansi-instasi terkait harus tetap melaksanakan peraturan tersebut dengan baik" (Ccp, 21/05/2012). Pernyataan tersebut dipertegas oleh Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bandung yang mengatakan : " pada saat terjadi bencana di lokasi mereka langsung melaporkan melalui *handytolky* berkooordinasi dengan BPBD Kabupate Bandung dan instansi lainnya menghitung jumlah korban dan jiwa yang ada dilapangan". (Ysr, 04/06/2012).

Berdasarkan hasil wawancara bersama aparatur di atas bahwa ketepatan waktu yang diberikan sudah baik dalam hal penanggulangan bencana banjir. Kondisi tersebut diperjelas berdasarkan hasil wawancara bersama masyarakat Kampung Cieunteung yang mengatakan: "ada tenggang waktu kedatangan bantuan dari BPBD/ pemerintahan tetapi warga sudah siap-siap dalam menghadapi banjir" (Mat 13/05/2012). Pernyataan tersebut sama halnya dengan hasil wawancara bersama masyarakat baik Kampung Cigosol, Kampung Jambatan, Kampung Ciputat dan Kampung Kulalet, dengan nada yang hampir sama mengatakan :

> "BPBD Kabupaten Bandung serta instansi pemerintahan suka datang tergantung koordinasi kami di bawah kepada bpbd, dapat di hitung dalam beberapa jam, dilihat dari sering bersamaanya bencana banjir di majalaya, banjaran, baleendah, maka di sni ada *share* antara Baraya Bandung, Garda Caah (relawan), masyarakat peduli bencana, masyarakat yang terkena bencana banjir, jadi kami saling membantu satu sama lainnya, *da eta ge kanggo kaurang-urang keneh bantosan nana*." (Frs, 13/05/2012), (Dky, 12/05/2012), (Edn, 20/05/2012) dan (Spt, 20/05/2012).

Berdasarkan hasil wawancara bahwa ketepatan waktu yang diberikan BPBD Kabupaten Bandung sudah baik tentunya di bantu adanya kerjasama, koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik itu instansi pemerintahan, relawan dan masyarakat sehingga dapat tertangani korban bencana banjir. Pelayanan BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah dalam penanggulangan banjir selain adanya ketepatan waktu dalam penanganan penanggulangan bencana banjir, pemerataan pelayanan menjadi hal yang penting. Pemerataan pelayanan sangat penting untuk warga yang terkena bencana banjir, berdasarkan hasil wawancara besama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bandung beliau mengatakan :

> "fokus utamanya BPBD Kabupaten Bandung adalah terhadap para pengungsi dengan memberikan berbagai kebutuhan-kebutuhan mereka seperti alas tidur, selimut, bahan pokok rumah tangga dan lain-lainnya. kalo tidak ada pengungsi tidak ada pelayanan artinya masyarakat mampu bertahan".

Berdasarkan wawancara tersebut BPBD Kabupaten Bandung untuk saat ini memfokuskan kepada para pengungsi karena adanya keterbatas alokasi dana, dan mereka berpendapat kalau yang tidak mengungsi berarti meraka masih mampu untuk memenuhi akan kebutuhan pokok mereka sendiri. Fokus BPBD Kabupaten Bandung yang lebih memfokuskan kepada pengugsi mendapat kritikan yakni kurang meratannya bantuan logistik bagi korban yang tidak mengungsi.

Pernyataan tersebut diperjelas oleh hasil wawancara dengan masyarakat Kampung Ciputat yang menyataka : "*bantuan ti BPBD Kabupaten Bandung, terutama cai bersih teu merata, ngan di simpeun di wilayah jambatan sareng kelurahan Andir kahoyong mah langsung di salurkeun ka sekitar kampung*" (Spt, 20/05/2012). Pernyataan tersebut diertegas oleh masyarakat yang ada di Kampung Kulalet yang mengatakan : *setiap banjir di wilayah Kampung Kulalet pasti pareum listrik dugi ka banjir saat, cai bersih ti pemerintah teu aya, sadeungkeun masyarakat peryogi pisan kana pasokan cai bersih kangge kaperluan-kaperluan bebersih*" (Edn, 20/05/2012). Keterbatasan pasokan air tentunya menjadi perioritas yang utama ke depannya agar, keterbatasan pasokan bantuan terutama air bersih dapat tertangani dengan baik.

Pernyataan lainnya hasil wawancara dengan masyarakat Kampung Cieunteung mengenai pemerataan pelayanan mereka mengatakan : "merata,

secara keseluruhan" (Mat 13/05/2012), sedangkan di Kampung Cigosol yang lebih kritis pendapatnya mengatakan :

> "belum secara utuh dan kongkrit, masih di bantu bersama relawan, belum merata karena keterbatasan personil. meskipun ada tapi belum tentu menguasai kebencanaan, karena dari pengalaman, dan lokasi secara keseluruhan hanya orang lokal yang mengetahui lokasi secara keseluruhan. tetapi palayanan koordinasi dan komunikasi sudah terpenuhi". (Frs, 13/05/2012).

Pemerataan pelayanan tersebut berdasarkan hasil wawancara, bahwa ada sebagian yang sudah menerima bantuannya, tetapi ada juga yang belum menerima bantuan, BPBD Kabupaten Bandung juga memahami akan hal tersebut kareana kekurangan alokasi dana dan jumlah aparatur. Pemerataan pelayanan tentunya ke depanya perlu dimaksimalkan terhadap warga masyarakat yang tidak mengungsi, sebab sama-sama masyarakat yang terkena bencana banjir.

Ketidakmerataaan pelayanan BPBD Kabupaten Bandung di wilayah Kecamatan Baleendah dalam penanggulangan bencana banjir, tentunya menghadapi sifat masyarakat yang merasa tidak puas akan kinerja BPBD Kabupaten Bandung, hal tersebut berdasarkan hasil wawancana bersama Kepala Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bandung yang mengatkan : "ada masyarakat yang sampai melempar botol minuman dan sebagainya serta adanya yang memberi kritikan kepada BPBD Kabupaten Bandung. Kondisi tersebut lumrah dan wajar" (Pdn, 28/05/2012). Diperjelas pernyataan tersebut oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bandung yang mengatakan :

> "kadang kala mereka emosi karena tidak kebagian bantuan, tetapi yang kebagian bantuan merasa senang dan tidak ada masalah. Kondisi tersebut dikarenakan karena terbatasnya jumlah dana dan jumlah masyarakat yang

> terkena banjir kurang dapat di tetapkan jumlah *real* atau pastinya di lokasi bencana" (Ccp, 21/05/2012).

BPBD Kabupaten Bandung sebagai instansi pemerintahan sikap yang diberikan BPBD Kabupaten Bandung tetap responsif kepada masyarakat terbuka artinya menerima kritikan hal tersebut di perkuat dengan hasil wawancara bersama masyarakat Kampung Cigosol yang mengatakan : "tidak seluruhnya masyarakat beradaptasi dengan BPBD Kabupaten Bandung, tetapi ada masyarakat yang memberikan kritik kepada BPBD dan BPBD menerima akan kritikan dari masyarakat" (Frs, 13/05/2012). Pernyataan mengenai sikap yang diberikan BPBD Kabupaten Bandung dipertegas juga oleh masyarakat Kampung Cieunteung yang berpendapat : "sikapnya biasa, terbuka terhadap masyarakat, menerima kritikan dari masyarakat" (Mat 13/05/2012).

Berdasarkan hasil wawancara bahwa sikap BPBD Kabupaten Bandung mereka terbuka dan menerima kritikan dari masyarakat. Sikap responsif BPBD Kabupaten Bandung juga terhadap instnsi-instansi pemerintahan dan LSM yang terkait, hal tersebut berdasarkan hasil wawancara bersama instansi terkait yakni Dinas Sosial Kabupaten bandung yang di wawancara adalah Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial yang mengatakan :

> "bahwa setiap kali ada bencana mereka BPBD Kabupaten Bandung langsung berkoordinasi dengan instnsi-instansi pemerintahan dan LSM terkait, sehingga pelaksanaan penanggulangan bencana banjir dapat berjalan sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan" (Ysr, 04/06/2012).

Berdasarkan hal tersebut bahwa sikap BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir terbuka, menerima kritikan dan sigap dalam berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Kehandalan yang dimiliki BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir sudah baik dilihat dari ketepatan waktu dalam penanggulangan bencana banjir yakni sesuap dengan SOP minimal 1x6 jam serta sifat yang simpatik yang di perlihatkan dengan keterbukaan aparatur BPBD Kabupaten Bandung terhadap kritikan masyarakat, mengenai kurang meratanya bantuan untuk keseluruhan korban bencana banjir akbiat kurangnya jumlah aparatur dan dana skarena bencana banjir didak dapat ditentukan alokasi bantuan-bantuan secara pasti.

4.2.3 Jaminan BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir.

Jaminan adalah sesuatu yang diberikan untuk menumbuhkan rasa percaya masyarakat Kecamatan Baleendah kepada BPBD Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir. Jaminan yang dapat memberikan rasa kepercayaan dari masyarakat diantaranya pengetahuan baik yang dimiliki BPBD Kabupaten Bandung dan pengetahuan yang diberikan kepada masyarakat oleh BPBD Kabupaten Bandung mengenai penanggulangan bencana banjir. Pengetahuan, kesopansantunan dan kemampuan BPBD Kabupaten Bandung baik terhadap masyarakat maupun terhadap dinas instansi terkait atau SKPD serta LSM ketika berkoordinasi, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana banjir.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bandung mengatakan bahwa pengetahuan BPBD Kabupaten Bandung :

> "yang sampai saat ini untuk bencana, kami melakukan pemetaan, mitigasi, kontijensi dengan baik, yang harus di pahami aparat adalah di awal proses bencana ini, hujan sekian milimeter kerjasama dengan PSDA karena punya data curah hujan. Masih rendah pengetahuannya, kalo yang lain-lain. haknya mau kewajibannya kadang berhalangan. Personaliti secara *real* realitaya, hanya sedikit yakni 3 aparatur yang mempunyai sertivikasi kebencanaan longsol, banjir, merapi dari Provinsi Jawa Barat dan Pusat, bahkan menjadi tenaga ahli provinsi jabar. Pemahaman yang dan penjiwaan yang baik dari aparatnya kemanapun harus dibawa pencatatan bisa berkomunikasi" (Ccp, 21/05/2012).

Pengetahuan BPBD Kabupaten Bandung di perjelas juga berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang mengatakan :

> "kita berupaya tahun dari ke tahun terus meningkat dengan adanya pelatihan-pelatihan untuk TRC yang saat ini dari 31 wilayah kecamatan baru 2 TRC untuk 2 Kecamatan, tentunya itu tidak mencukupi apabila bencana datang bersamaan". (Pdn, 28/05/2012).

Melihat hasil wawancara tersebut bahwa pengetahuan BPBD Kabupaten Bandung baru ada sedikit yang memahami kebencanaan secara keseluruhan, tetapi, BPBD Kabupaten Bandung tetap setiap tahun mengadakan pelatihan dan pendidikan untuk meminimalisir akan kekurangan tersebut. Pengetahuan BPBD Kabupaten Bandung selain adanya pelatihan dan pendidikan untuk meminimalisir kekurangan tersebut BPBD Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD Kabupaten Bandung yang mengatakan :

> “selama ini bagus koordinasinya jadi begitu ada banjir langsung berkoordinasi sesuai bidang dan tugas masing-masing. Komando : membawahi SKPD-SKPD yang lainnya. Perlu di ketahui bahwa BPBD di kepalai oleh seorang Sekretaris Daerah biar koordinasi berjalan lancar otomatis BPBD membawahi SKPD-SKPD yang lain”. (Snr, 28/05/2012)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa penanggulangan bencana banjir hanya sedikit personil yang memahami tentang penanganan penanggulangan bencana banjir. Kekurangan pengetahuan tersebut terlihat dari kurang mengetahui lokasi banjir secara menyeluruh, meskipun demikian BPBD Kabupaten Bandung berkoordinasi dengan SKPD-SKPD di Kabupaten Bandung dan relawan setempat untuk mengatasi kekurangan tersebut. Pengetahuan tentang lebih detai mengenai situasi dan kondisi di lokasi bencana banjir di Kelurahan Baleendah dan Kelurahan Andir daerah pemukiman warga yang banyak gang-gang, sehingga BPBD Kabupaten Bandung berkoordinasi dan berkerja sama dengan relawan yang berada di lokasi karena mereka lebih tahu akan lokasi secara keseluruhan.

BPBD Kabupaten Bandung berupaya untuk meminimalisir kekurangan meraka dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) tiap tahun. Diklat tersebut diikuti oleh semua aparatur dan LSM/ relawan yang terlibat dalam kegiatan penanggulangan bencana khususnya untuk di wilayah Baleendah Bencana banjir. Tujuan diadakannya diklat adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untk melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan kebutuhan BPBD Kabupaten Bandung. Pemberian jaminan / kepercayaan kepada masyarakat dibuktikan juga oleh kesopansantunan BPBD Kabupaten Bandung baik dalam pengkoordinasian, pengkomandoan dan

pelaksanaan penanggulangan. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Seksi Perlindungan Sosial korban Bencana Alam dan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bandung mengatakan : "BPBD Kabupaten Bandung sangat sopan terhadap aparatur atau pihak-pihak yang terkait baik dalam hal pengkomandoan, pengkoordinasian serta dalam pelaksanaan penanggulangan bencanan banjir mereka tetap ramah" (Ysr, 04/06/2012). Kesopanan BPBD Kabupaten Bandung juga diperlihatkan kepada masyarakat yang terkena bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah, berdasarkan hasil wawancara secara keseluruhan mengatakan : "mereka sudah sopan dan tatakrama masih ada, masih bisa dikatakan lumayan dalam membantu masyarakat yang terkena banjir". (Frs, 13/05/2012), (Mat 13/05/2012), (Dky, 12/05/2012), (Edn, 20/05/2012) dan (Spt, 20/05/2012).

Kesopansantunan merupakan salah satu penentu yang sangat penting dalam tercapainya pelaksanaan suatu kegiatan. Kegiatan yang berhubungan dengan adanya koordinasi, komando oleh BPBD Kabupaten Bandung tentunya sudah dimiliki, sebab jika tidak maka baik pengkomandoan dan pengkoordinasian tidak akan berjalan dengan lancar. Pelaksanan penanggulangan bencana banjir membutuhkan kerahaman dan kesopansantuan, sebab sikap dan sifat yang terbentuk oleh masyarakat yang terkena banjir bisa di bilang sangat sensitif apalagi wilayah Kecamatan Baleendah sudah sering terkena bencana banjir.

Kondisi tersebut sangatlah penting ketika dalam pelaksanaan penanggulangan bencana untuk menghadapi masyarakat membutuhkan keramahan dan kesopansantunan kepada masyarakat. Situasi tersebut membuat

masyarakat di wilayah Kecamatan Baleendah akan merasa ada yang memperhatikan dan mengayomi akan kondisi yang mereka alami.

Kemampuan BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah dalam penanggulangan bencana banjir berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Kampung Cieunteung mengatakan : "sudah *dilaksanakeun*, lancar saja pemahaman BPBD terhadap kebutuhan ada tengang waktu 1 minggu, secara berangsur, tidak begitu langsung ada tenggang waktu dalam pemenuhan bantuan keperluan masyarakat" (Mat 13/05/2012). Berdasarkan hasil wawancara tersebut kemampuan aparatur BPBD Kabupaten Bandung sudah bisa dikatakan baik dengan asanya pemenuhan kebutuhan sedangkan untuk kemampuan secara keseruhan aparatur sesuai dengan hasil wawancara yang mempunyai sertivikasi kebencanaan baik dari tingkat Provinsi dan Pusat baru ada tiga orang. Sertivikasi kebencanaan maksudnya adalah keahlian yang sudah setara atau ahli dalam bidang kebencanaan setingkat Provinsi dan Pusat. Kebencanaan yang dimaksud adalah keahlinan kebencanaan seperti bencana gunung merapi, tsunami, dan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Kondisi tersebut tentunya menjadi salah satu kendala BPBD Kabupaten Bandung dalam menjalankan kegiatan-kegiatan kebencanaan khususnya bencana banjir tetapi pihak BPBD Kabupaten Bandung berupaya memperkecil dan meminimalisir akan kendala yang mereka alami. Jaminan yang di miliki oleh BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir yang terdiri dari pengetahuan, kesopansantunan dan kemampuan, bahwa pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki BPBD

Kabupaten Bandung kurangnya mengtahui lokasi secara keseluruhan dan baru 3 orang yang memiliki sertivikasi dari pihak provinsi dan pusat, tetapi BPBD Kabupaten Bandung setiap tahun melakukan diklat untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan aparatur BPBD Kabupaten Bandung dan koordinasi dengan SKPD, LSM dam masyarakat berjalan dengan baik sedangkan kesopansantunan BPBD Kabupaten Bandung sudah berperilaku sopan baik dalam melakukan pengkomandoan, koordinasi dan pelaksanaan penanggulangan bersama pihak terkait.

4.2.4 Empati BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir.

Empati adalah suatu cara dalam memberikan perhatian yang tulus kepada masyarakat wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung yang terkena bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Bandung di wilayah Kecamatan Baleendah. Cara yang diberikan BPBD Kabupaten Bandung tersebut diantaranya dengan memahami kebutuhan masyarakat, pemberian pengetahuan ketika waktu peroperasian penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan Beleendah.

BPBD Kabupaten Bandung untuk memahami kebutuhan masyarakat wilayah Kecamatan Baleendah yang terkena bencana banjir, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bandung mengatakan : “siapapun yang terkena bencana khususnya banjir meraka pasti membutuhkan bantuan logistik dan kebutuhan pokok” (Ccp, 21/05/2012). Bantuan logistik dan kebutuhan pokok seperti yang terlihat pada tabel 4.3.

Bantuan yang diberikan oleh BPBD Kabupaten Bandung seperti hunian sementara (*shelter*), air bersih, kebutuhan-kebutuhan dasar ketika mereka benar-benar tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Pemenuhan kebutuhan tersebut, berdasarkan pernyataan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bandung mengatakan :

> "pihak BPBD Kabupaten Bandung sudah *asassment* di lapangan tempat pengungsian seperti air bersih sudah disediakan, di dorong dari pihak PDAM Kabupaten Bandung sama *water treatment* pengolahan air BPBD Kabupaten Bandung yang sudah disiapkan dan beberapa tangki dari Provinsi Jawa Barat, beras, lauk pauk dari Dinas Sosial Kabupaten Bandung, obat-obatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung serta makanan siap saji dari pemerintah pusat. Kebutuhan lainnya dapat dikondisikan dengan segera sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan karena dalam penanganan bencana banjir kebutuhan tidak dapat diprediksi oleh jumlah dari penduduk yang terkena dan luas genangan bencana banjir" (Ccp, 21/05/2012).

Berdasarkan hasil wawancara bahwa BPBD Kabupaten Bandung tetap menyediakan bantuan dengan keterbatas dana, tetapi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang ada dan berkordinasi dengan SKPD-SKPD Kabupaten Bandung untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Bencana banjir yang sering terjadi di Kecamatan Baleendah, mengharuskan pihak instansi terkait dalam hal ini BPBD Kabupaten Bandung memberikan pengetahuan kepada masyarakat, pemberian pengetahuan tersebut diantaranya melalui sosialisasi dan pendidikan terhadap masyarakat dan relawan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiap Siagaan BPBD Kabupaten Bandung beliau mengatakan :

> "kita melakukan sosialisasi dan pendidikan untuk wilayah Kecamatan Baleendah sudah dilaksanakan di daerah kampung Sipatahunan, pihak-pihak yang ikut dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan tersebut terdiri dari perwakilan relawan dan masyarakat" (Pdn, 28/05/2012).

Kegiatan sosialisasi dan pendidikan terhadap masyarakat dan relawan bertujuan agar mempunyai pengetahuan tentang penanganan bencana banjir, menajdikan pribadi yang mandiri dan sigap/ siaga terhadap bencana banjir. Pengetahuan yang masyarakat dapatkan mengenai penanganan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Kegiatan yang di lakukan BPBD Kabupaten Bandung tentunya untuk kepentingan masyarakat wilayah Kecamatan Baleendah, sehingga dalam penanggulangan bencana banjir antara instansi pemerintahan, masyarakat serta swasta dapat berkerja sama secara terpadu.

Waktu pengoperasian penanggulangan bencana banjir yang dilakukan BPBD Kabupaten Bandung di wilayah Kecamatan Baleendah adalah dengan membanngun posko-posko. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bandung mengatakan:

> "personil yang *stand by* 24 jam berjumlah 2 orang yang berjaga, karena bencana banjir tidak saja terjadi di wilayah Kecamatan Baleendah. Bencana banjir terjadi di wilayah-wilayah lainnya seperti di sekitarnya terkena banjir seperti Wilayah Kecamatan Dayeuhkolot, Wilayah Kecamatan Bojong Soang, Wilayah Kecamatan Banjaran, wilayah Kecamatan Pameungpeuk, sehingga dengan keterbatasan personil atau aparatur BPBD Kabupaten Bandung yang berjaga di posko-posko berjumlah 2 orang. Penjagaan di posko-posko oleh personil atau aparatur tersebut siaga 24 jam dari terjadinya bencana sampai selesai kegiatan peanggulangan bencana banjir" (Ccp, 21/05/2012).

Pernyataan sama lainnya datang dari TAGANA di Wilayah Kecamatan Baleendah yang mengatakan : "waktu pengoperasian dilakukan pemetaan dan koordinasi baik sebelum sampai sesudah, kadang kalo ada posko *standby* 2 orang atau perwakilan, karena banjir bukan terjadi di baleendah saja" (Edi, 26/05/2012). Melihat kondisi tersebut tentunya jumlah tersebut kurang memadai apabila terjadi bencana banjir yang semakin parah pada malam hari atau adanya kebutuhan yang

mendesak dari masyarakat sekitar, karena baik itu bencana banjir atau jumlah kebutuhan-kebutuhan pokok sewaktu-waktu bisa saja tidak sesuai dengan yang diprediksikan sebelumnya.

Berbeda dengan pernyataan masyarakat Kampung Cieunteng mengenai waktu pengoperasian dalam penanggulangan banjir oleh BPBD Kabupaten Bandung yang mengatakan :

> "ada ketika bencana banjir, ketika setelah banjir kadang-kadang ada BPBD dan aparat yang lainnya tetapi tidak setiap banjir, ada cuma beberapa kali, padahal masyarakat sangat membutuhkan untuk membersihkan sampah, lumpur" (Mat 13/05/2012).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut sangat berbeda antara pernyataan aparatur dan masyarakat, karena dapat di simpulkan, banjir bukan terjadi di wilayah Kecamatan Baleendah saja, melaikan di daerah lainnya juga seperti di wilayah Kecamatan Dayeuhkolot dan di wilayah Kecamatan Bojong Soang yang saling berdekatan, di tambah kurangnya jumlah personil dari aparatu BPBD Kabupaten Bandung menyebabkan tidak merata keseluruh wilayah yang terkena banjir di wilayah Kecamatan Baleendah. Kondisi tersebut membutuhkan perhatian yang lebih untuk ke depannya bagi BPBD Kabupaten Bandung di wilayah Kecamatan Baleendah dalam penangulangan bencana banjir kareana yang namanya bencana banjir sangat membutuhkan perhatian yag sangat serius karena menyangkut jiwa, harta masyarakat di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.

Empati yang diberikan BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir sudah baik hal tersebut terlihat bahwa aparatur BPBD Kabupaten Bandung sudah mengetahui akan bantuan-bantuan yang diperlukan dan melakukan pendidikan dan sosialisasi terhadap masyarakat serta siaga 24 jam di posko-posko yang sudah ditetapkan.

4.3 Responsivitas BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir.

Responsivitas adalah sikap tanggap dari instansi pemerintahan kepada yang menerima pelayanan atau masyarakat. Seberapa jauh mereka melihat administrator negara atau birokrasi publik bersikap tanggap yang tinggi terhadap apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan dan aspirasi mereka. Responsivitas menggambarkan kualitas interaksi antara administrasi publik dengan klien, hal ini berarti responsivitas dapat dilihat dari sejauh mana kebutuhan, masalah, tuntutan dan aspirasi masyarakat dapat terpenuhi.

Responsivitas merupakan cara yang efisien dalam *memanage* atau mengatur urusan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah atau lokal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, karenanya baik pemerintah pusat maupun daerah dikatakan responsif terhadap kebutuhan masyarakat apabila kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi oleh instansi pemerintahan. BPBD Kabupaten Bandung sebagai instansi pemerintahan yang menangani dalam penanggulangan bencana. Khususnya di wilayah Kecamatan Baleendah dalam penanggulangan bencana banjir tentunya harus memahami kebutuhan masyarakat

wilayah Kecamatan Baleendah, memberikan pelayanan yang cepat dan memberikan informasi tentang penanggulangan bencana banjir yang kejadiannya meskipun dapat di prediksi tetapi harus tetap sigap dan siaga. Respon terhadap keinginan dan kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung yang sering terkena bencana banjir.

Responsivitas BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah dapat dikatakan cukup responsif hal tersebut terlihat daya tanggap BPBD Kabupaten Bandung sudah baik dengan adanya penanganan korban bencana banjir, tetapi kurangnya pemenuhan kebutuhan terhadap keseluruhan korban bencana banjir yang sementara ini fokusnya pada korban yang mengungsi. Responsivitas BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir untuk lebih jelasnya dapat dilihat di bawah ini:

4.3.1 Daya Tanggap BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir.

Daya Tanggap adalah kemampuan BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam memberikan pelayanan secara cepat, penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai penanggulangan bencana banjir. Kegiatan penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah, membutuhkan daya tanggap yang tinggi terhadap masyarakat yang terkenan bencana banjir. Kemampuan daya tanggap tersebut dipengaruhi oleh cepat tidaknya pemberian pelayanan oleh BPBD Kabupaten Bandung di wilayah Kecamatan Baleendah dalam penanggulangan bencana banjir dan proses

pencapaian informasi kepada masyarakat mengenai penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik beliau mengatakan :

> "soal pelayanan yang diberikan oleh BPBD Kabupaten Bandung di wilayah Kecamatan Baleendah dalam penanggulangan bencana banjir, aparatur BPBD Kabupaten Bandung, kami memberikan pelayanan minimal 1x6 jam dan maksimal 2x24 jam sudah langsung berkoordinasi antara instansi terkait dan relawan setempat yang ada wilayah Kecamatan Baleendah" (Ccp, 21/05/2012).

Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa kecepatan pelayanan yang diberikan BPBD Kabupaten Bandung, baik dalam pengkomandoan, korrdinasi dan pelaksanaan penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah mengacu pada Pra SOP yang mereka miliki. Pendapat tersebut dipertegas oleh wawancara bersama masyarakat Kampung Cogosol yang mengatakan : "bahwa pihak BPBD Kabupaten Bandung datang tidak lama setelah terjadi bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah" (Frs, 13/05/2012). Hasil wawancara tersebut dapat dilihat atau dibandingkan dengan prosedur sederhana pra SOP (Standar Operasional Pelayanan) penanggulangan bencana banjir. BPBD Kabupaten Bandung langsung melakukan *assesment* di lapangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, data hasil *assesment* meliputi :

1. Luas areal kejadian.
2. Jumlah Korban.
3. Jumlah kerusakan bangunan dan sarana lainnya.
4. Analisa sementara kebutuhan sementara penanggulangan bencana.

Hasil *asessment* tersebut disampaikan kepada bidang kedaruratan dan logistik melalui atau di awali koordinasi lisan dengan segera dan ditindak lanjuti dengan nota dinas (1x6 jam) paling minimal dan (1x24 jam) paling maksimal. Koordinasi oleh BPBD Kabupaten Bandung dengan instansi-instansi berjalan dengan lancar, karena BPBD Kabupaten Bandung secara *ex-officio* dikepalai oleh sekretaris daerah Kabupaten Bandung sehingga koordinasi dengan instansi dapat berjalan secara cepat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Bandung yang mengatakan :

> "bahwa responsivitas BPBD Kabupaten Bandung di wilayah Kecamatan Baleendah dalam penanggulangan bencana banjir cukup cepat dan resposif. Resfonsivitas tersebut dilihat dari adanya koordinasi mengenai adanya peringatan dini terhadap masyarakat sekitar wilayah Kecamatan Baleendah" (Ysr, 04/06/2012).

Pernyataan mengenai kecepatan akan pelayanan yang diberikan BPBD Kabupaten Bandung disampaikan juga berdasarkan hasil wawancara bersama TAGANA di wilayah Kecamatan Baleendah yang mengatakan :

> "Penentuan peringatan dini di wilayah Kecamatan Baleendah, BPBD berkoordinasi dengan LSM-LSM yang ada di wilayah Pangalengan, Banjaran dan Majalaya dan terakhir di wilayah Baleendah seperti Garda Caah, Baraya Bandung, dan FKDM" (Edi, 26/05/2012).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa sangat jelas akan pemberian informasi mengenai bencana banjir dan kondisi-kondisi yang akan menyebabkan bencana banjir tersebut. BPBD Kabupaten Bandung menyampaikan informasi mengenai data-data atau kondisi cuaca ataupun kondisi lingkungan kepada baik instansi setempat yang ada di Kabupaten Bandung jua LSM-LSM yang ada yang

saling berkoordinasi agar terjadinya bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah dapat segera teratasi semaksimak mungkin.

Penyampaian informasi mengenai bencana banjir untuk wilayah Kecamatan Baleendah, berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik belaiu mengatakan :

> "Koordinasi BPBD Kabupaten Bandung bersama LSM-LSM yang ada melalui *Handy Talky* atau via Telepon serta SMS. Penentuan peringatan dini tersebut berdasarkan apabila ketinggian di majalaya 3,8 meter di wilayah sungainya, maka BPBD Kabupaten Bandung langsung menggerakan timnya dan LSM-LSM ke wilayah Kecamatan Baleendah. Untuk selanjutnya masyarakat setempat diberitahukan baik lewat pengeras suara mesjid-mesjid setempat maupun kantor RW setempat yang ada di wilayah Kecamatan Baleeendah. Kondisi aman dapat diprediksi apabila di wilayah majalaya ketinggian air mencapai 2,7 meter - 3 meter maka hal tesebut tidak ada masalah karena ukuran tersebut sebagai acuan BPBD Kabupaten Bandung sebagai langkah awal dalam menentukan kesiapsiagaan di wilayah Kecamatan Baleendah" (Ccp, 21/05/2012).

Pernyataan tersebut dipertegas oleh pendapat masyarakat Kampung Kulalet bahwasannya beliau mengatan : *"kanggo peringatan banjir mah, masyarakat Ketua RT nu aya di Kampung Kulalet ngumumkeun lewat speaker Masjid tentang keayaan cai di cisangkuy lamun bade terjadi banjir teh, sahingga masyarakat siaga"* (Edn, 20/05/2012). Penyampain informasi tersebut sama halnya untuk beberapa darah lainnya yang masuk ke dalam daerah yang sering banjir yang berada di wilayah Kecamatan Baleendah mereaka masyarakat seperti Kampung Cieunteung, Kampung Cogosool, Kampung Ciputat, Kampung Jambatan dan wilayah lainnya mengumumkan lewat pengeras suara menganai kondisi lingkungan yang akan mengalami datangnya bencana banjir, sehingga masyarakat tersebut menjasi siaga akan kondisi tersebut.

Daya tanggap yang dimiliki BPBD di wilayah Kecamatan Beendah dalam penanggulangan bencana banjir sudah baik. Kondisi tersebut tersebut terlihat dengan cepatnya waktu penanganan korban bencana banjir dalam waktu minimal 1x6 jam dan maksimal 2x24 jam serta langsung berkoordinasi dengan instansi/ SKPD terkait serta LSM dan masyarakat setempat dalam melaksanakan pelayanan dan peyamaian informasi mengenai bencana banjir.

4.3.2 Keinginan Masyarakat terhadap BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir.

Keinginan Masyarakat adalah harapan masyarakat di wilayah Kecamatan Baleendah kepada BPBD Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir. Harapan masyarakat apabila ditanya mengenai keinginan mereka tentang bencana, jawaban mereka tentunya ingin terhindar dari yang namannya bencana, bencana dapat merugikan jiwa, harta dan kerusakan lingkungan hidup. Masyarakat di wilayah Kecamatan Baleendah yang terkena bencana banjir sudah jelas keinginan mereka tentunya bebas dari yang namannya bencana banjir. Bencana banjir sering terjadi di wilayah Kecamatan Baleendah dan sekitarnya, mereka sudah terbiasa dengan bencan banjir, tetapi tetap saja kedepannya bahwa bancana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah tidak terjadi lagi. Ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulagan Bencana di jelaskan dalam pasal 26 tentang hak masyarakat yang isinya sebagai berikut :

1. Setiap orang berhak :
    a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
    b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
    c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.
    d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
    e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
    f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
2. Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan di atas sudah jelas dijabarkan akan hak yang harus diperoleh oleh setiap masyarakat yang terkena bencana. Berdasarkan pengamata di lapangan bahwa kegiatan penanggulangan bencana

banjir oleh BPBD kabupaten bandung dalam memenuhi keinginan masyarakat wilayah Kecamatan Baleendah kurang cukup memenuhi keinginan masyarakat.

Berdarsarkan hasil wawancara bersama Kepala Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bandung yang mengatakan :

> "siapapun yang terkena bencana, masyarkat membutuhan khunian sementara, air, kebutuhan2 dasar ketika mereka benar-benar tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Kan kita sudah *asessment* di lapangan tempat pengungsian,air bersih sudah disediakan, di dorong dari pihak PDAM, sama *watertreatment* atau pengolahan air BPBD yang sudah disiapkan serta dan mempunyai beberapa tangki dari prov jabar, beras, lauk pauk dari Dinsos Kabupaten Bandung dan sebagian dari pusat makanan siap saji" (Ccp, 21/05/2012).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut memang dalam kegiatan penanggulangan bencana banjir BPBD Kabupaten Bandung sudang melaksanakan tugas mereka untuk membantu para korban banjir yang ada di wilayah Kecamatan Baleendah. Pemenuhan bantuan tersebut tentunya belum maksimal secara menyeluruh bila di bandingkan dengan jumah masyarakat di wilayah Kecamatan Baleendah yang mancapai 10.086 jiwa yang menjadi korban banjir.

Pernyatan tersebut dipertegas berdasarkan hasil wawancara bersama TAGANA di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung yang menyatakan :

> "pemenuhan kebutuhan atau keinginan masyarakat terkendala oleh jumlah aparatur BPBD Kabupaten Bandung dan Alokasi dana serta peraturan daerah yang belum jadi sehingga keinginan masyarakat kurang dapat terlaksana secara keseluruhan" (Edi, 26/05/2012).

BPBD Kabupaten Bandung sementara ini konsentrasi pada wilayah pengungsian yakni pemenuhan kebutuhan-kebutuhan logistik masyarakat di pengungsian. Bantuan tersebut kurang dapat menyeluruh kepada korban bencana

banjir secara keseluruhan yang tidak ikut mengungsi, juga bantuan ketika sesudah banjir seperti rekontruksi dan reahabilitasi kurang terlaksana dengan baik yaang di pengaruhi oleh belum rampungnya peraturan daerah mengenai kebencanaan dan jumlah alokasi dana serta jumlah aparatur.

Keinginan masyarakat di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung yang terkena bencana banjir, tentunya masyarakat membutuhkan bantuan-bantuan. Berdasarkan hasil wawancara bersama masyarakat di lapangan terdiri dari masyarakat Kampung Cieunteung Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah, Kampung Cigosol, Kampung Jambatan, Kampung Ciputat dan Kampung Kulalet Kelurahan Andir Kecamatan Baleendah yang sudah di gabungkan hasil masyarakat tersebut dapat disimpulakan bantuan-bantuan yang mereka butuhkan sebagai berikut :

Pertama, peralatan-peralatan seperti karet pengeruk lumpur, karena ketika ketika banjir surut menyisakan lumpur yang tebal dan juga bantuan dari aparatur agar proses pembersihan lumpur-lumpur dapat segera teratasi sebab di wilayah Kecamatan Baleendah. Bencana banjir yang terjadi menyisakan lumpur yang tidak sedikit, bencan banjir di wilayah tersebut genangan tertinggi mencapai 3 meter atau sampai atap rumah-rumah, maka tidak heran ketikas genangan air surut lumpur yang ada di wilayah Kecamatan Baleendah bisa mencapai ketebalan 1 m.

Kedua, bantuan rekontruksi dan rehabilitasi bangunan-bangunan yang rusak. Batuan rekontruksi dan rehabilitasi meskipun masyarakat pernah mendapatkan bantuan, tetapi untuk sekarang-sekarang mereka belum dapat bantuan tersebut.

Ketiga, Keinginan masyarakat masyarakat lainnya adalah BPBD Kabupaten Bandung harus lebih solid dan kongkrit dalam hal komunikasi dengan relawan dan masyarakat setempat. Sikap yang solid dan kongkrit dalam berkoordinasi sangat penting dan dibutuhkan karena pihak aparatur BPBD Kabupaten Bandung tidak semuanya tahu akan keseluruhan lokasi bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah.

Keempat, Sarana dan prasarana juga tentunya menjadi keinginan masyarakat di wilayah Kecamatan Baleendah, selama ini peralatan-peralatan atau logistik hanya disimpan di Kecamatan Baleendah, seharusnya peralatan-peralatan tersebut di simpan minimal di RW-RW atau RT-RT setempat sehingga setiap daerah yang terkena banjir dapat memanfaatkan peralatan-peralatan tersebut untuk kebutuhan masyarakat di daerah yang terkena bencana banjir. Persediaan peralatan-peralatan di tempat yang sangat terjangkau oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Baleendah tentunya harus segera tercapai dan terpenuhi sebab bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah sering terjadi kejadiannya, sehingga membutuhkan perhatian dari BPBD Kabupaten Bandung, instansi-instansi terkait dalam penanggulangan bencana banjir tersebut terutama dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Baleendah.

Kelima, percepat pengerukan Sungai Citarum agar pendangkalan dapat meminimalisir bencana banjir. Kedepannya masyarakat berharap tentunya derah mereka bebas dari bencana banjir.

Meihat kondisi tersebut hal tersebut tentunya dibutuhkan perhatian yang lebih dari aparatur dalam hal ini BPBD Kabupaten Bandung yang berkooordinasi

dengan instansi-instansi atau SKPD yang ada di Kabupaten Bandung untuk membantu masyarakat dan memenuhi aspirasi dari masyarakat wilayah Kecamatan Baleendah. Kegiatan penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah bukan hanya tanggung jawab BPBD Kabupaten Bandung dalam penanggulangannya, masyarakat juga mempunyai kewajiban akan meminimalisir terjadinya bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah.

Bencana banjir terjadi akibat dari adanya yang membuang sampah sembarangan, perusakan lingkungan, penggunaan lahan yang merupakan resapan air dan dan sebagainya. Masyarakat sebagai warga yang mengetahui akan kondisi daerahnya tentunya ikut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan yang kedepannya dapat berpengaruh dalam meminimalisir terjadinya bencana banjir. Kewajiban masyarakat dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 27 yang isinya sebagai berikut :

Setiap orang berkewajiban:

a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

Berdasarkan perundang-undangan di atas, bahwa masyarakat juga dituntut akan menjaga kelestarian lingkungan khususnya untuk masyarakat di wilayah Kecamatan Baleendah terutama. Prilaku yang harus dilakukan dan dilaksanakan

tersebut diantaranya agar tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak lingkungan di wilayah Kecamatan Baleendah, ikut serta dalam penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah dan memberikan informasi kepada instansi pemerintahan dalam hal ini BPBD Kabupaten Bandung mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kebencanaan.

Kondisi tersebut tentunya apabila adanya saling memperhatiakn satu sama lain dan saling keterbukaan antara pemerintah dengan masyarakat, maka dalam hal melaksanakan penanggulangan bencana banjir yang sesuai dengan keinginan masyarakat dapat terealisasikan dengan baik. Singkronisasi tersebut diharapkan ke depannya palaksanaan penanggulangan bencana banjir dapat berjalan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada tanpa ada hambatan-hambatan yang menghalangi dalam proses penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah. Keinginan masyarakat di wilayah Kecamatan Baleendah kurang terlaksana, hal tersebut terkendala oleh kurangnya jumlah personil, dana serta peraturan yang ada di Kabupaten Bandung. BPBD Kabupaten Bandung sementara ini konsentrasi pada wilayah pengungsian yakni pemenuhan kebutuhan-kebutuhan logistik masyarakat di pengungsian.

4.4 Responsibilitas BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir.

Responsibilitas adalah tindakan BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam melaksanakan program kerja yang peka akan situasi dan target yang akan dicapai khususnya dalam penangulangan bencana banjir. Setiap institusi pemerintahan dalam melaksanakan kegiatan atau program mengacu pada ketentuan atau peraturan yang ada di dalam instisusi pemerintahan tersebut. Ketentuan atau peraturan dibuat untuk memudahkan instansi pemerintahan dalam melaksanakan kegiatannnya. BPBD Kabupaten Bandung selaku instansi pemerintahan yang membidangi masalah kebencanan mempunyai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana khususya penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah.

Responsibilitas BPBD Kabupaten Bandung di wilayah Kecamatan Baneeldah dalam penanggulangan bencana banjir dapat terwujud dengan baik. Terwujudnya responsibilitas dengan baik apabila prinsip responsibilitas ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, menjadi profesional dengan tetap menjunjung etika dalam menjalankan program kerja pemerintahan, dan menciptakan dan memelihara lingkungan kinerja pemerintahan yang sehat. Selain itu, prinsip ini juga mengandung prinsip yang mencerminkan kinerja pengelolaan instansi pemerintahan yang baik dan mengakui *stakeholders* serta mendorong

kerjasama yang aktif antara pemerintah dengan *stakeholders* untuk menciptakan kemakmuran dan kesejanteraan masyarakat.

Responsibilitas yang dimiliki BPBD Kabupaten Bandung di wilayah Kecamatan Baleendah dalam penanggulangan bencana banjir mengacu pada peraturan-peraturan yang ada di tingkat pusat maupun di tingkat daerah Kabupaten Bandung. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa BPBD Kabupaten Bandung menjalankan kegiatan penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah sudah berdasarkan pada peraturan dan prosedur sederhana pra SOP yang ada di BPBD Kabupaten Bandung. Responsibilitas BPBD di wilayah Kecamatan Baeendah Kabupaten Bandunga dalam penanggulangan bencana banjir tanggung jawab dan kerjasama yang dilaksanakan BPBD Kabupaten Bandun sudah cukup baik sesuai dengan peraturan peraturanyang ada. Responsibilitas BPBD di wilayah Kecamatan Baeendah Kabupaten Bandunga dalam penanggulangan bencana banjir dapat dilihat dari tanggung jawab dan Kerjasama antara perusahaan atau *stakeholder* di bawah ini :

4.4.1 Tanggung Jawab BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir.

Tanggung Jawab adalah kesediaan untuk menyiapkan diri dalam menghadapi resiko terburuk sekalipun, memberikan kompensasi atau informasi terhadap masyarakat di wilayah Kecamatan Baleendah yang terkena bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Bandung. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah oleh BPBD Kabupaten Bandung

berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bandung beliau mengatakan :

> "Kegiatan penanggulangan bencana banjir berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan tanggung jawab BPBD Kabupaten Bandung itu sendiri melainkan tanggung jawab semua pihak yang diantaranya pemerintahan, masyarakat dan swasta. Pelaksanaan penanggulangan bencana banjir tersebut dapat di lihat dari lambang BPBD Kabupaten Bandung itu sendiri dengan lambang segi tiga, artinya bahwa pelaksanaan penanggulangan bencana tersebut merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintahan, swasta dan masyarakat" (Ccp, 21/05/2012).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut sangat jelas bahwasannya menegnai penanggulangan becana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah merupakan tanggung jawab bersama yakni pemerintah, swasta dan masyarakat. BPBD Kabupaten Bandung selaku instansi pemerintahan yang dibentuk untuk penanggulangan bencana bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang sudah di atur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung. Tanggung jawab BBD Kabupaten Bandung berdasarkan peraturan tersebut mempunyai fungsi Pengkomandoan, Koordinasi dan Pelaksanaan dalam penanggulangan bencana banjir yang terdiri dari pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekontruksi.

Pernyataan tersebut diperkuat berdasarkan wawancara bersama Kepala Rehabilitasi dan Rekontrusksi BPBD Kabupaten Bandung yang mengatakan :

> "selama ini bagus koordinasinya jadi begitu ada banjir langsung berkoordinasi sesuai bidang dan tugas masing-msing. Fungsi Komando, BPBD Kabupaten Bandung membawahi SKPD-SKPD yang lainnya. Perlu di ketahui bahwa BPBD di kepalai okeh seorang Sekda biar koordinasi berjalan lancar otomatis BPBD membawahi instansi-instansi yang lain. Hasil kegiatan instansi-instansi mask dilaporkan kepad BPBD dan dinas-dinas masing" (Snr, 28/05/2012).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut sudah jelas bahwa BPBD Kabupaten Bandung merupakan instansi pemerintahan yang secara *ex-officio* berdasarkan Perbup Bandung Nomor 53 tahun 2010 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi BPBD Kabupaten Bandung dipimpin atau dikepalai oleh sekretaris daerah, sehingga BPBD Kabupaten Bandung tingkatannya di atas instansi-instansi yang ada di pemerintahan Kabupaten Bandung yang berhubungan dengan kebencanaan. Tujuan dari BPBD Kabupaten Bandung di pimpin oleh seorang sekretasis daerah agar dalam pelaksanaan fungsi-fungsi BPBD Kabupaten Bandung dapat terlaksana dengan baik.

Tanggung jawab BPBD dalam pengkoordinasian sudah terlihat ketika terjadi bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah, dengan melakukan koordinasi dengan atuan kerja perangkat daerah yang ada Kabupaten Bandung, instansi vertikan dalam hal ini BPBD Provinsi Jawa Barat dan BNPB Pusat, lembaga usaha dan pihak lain yang diperlukan dalam tahap baik pra bencana, tanggap darurat sampai pasca bencana banjir di wilayah Kabupaten Bandung.

Pengkomandoan BPBD Kabupaten Bandung diwilayah Kecamatan Baleendah dalam penanggulangan bencana banjir dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia yang ada di wilayah Kecamatan Baleendah, peralatan, logistik dari dari satuan perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah BPBD Provinsi Jawa Barat dan BNPB Pusat. Fungsi pelaksanaan BPBD Kabupaten Bandung di wilayah Kecamatan Baleendah dalam penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah pelaksanaannya

di laksanakan secara kordinasi dan terintegrasi dengan satuan perangkat derah lainnya.

Terlaksanannya fungsi-fungsi dari BPBD Kabupaten Bandung merupakan keseriusan BPBD Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai instansi pemerintahan yang membidangi mengenai kebencanaan. Keseriusan dan kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bandung dalam menjalin kemitraan dengan masyarakat di wilayah Kecamatan Baleendah merupakan salah satu sikap BPBD Kabupaten Bandung untuk memudahkan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir. Informasi-informasi mengenai keadaan di wilayah Kecamatan Baleendah di informasikan oleh LSM-LSM seperti Baraya Bandung dan Garda Caah, FKDM kepada BPBD Kabupaten Bandung, sehingga tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Bandung dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bandung beliau mengatakan :

> "bahwa meskipun BPBD Kabupaten Bandung memiliki kekurangan dalam jumlah aparatur BPBD Kabupaten Bandung dan pendanaan, BPBD Kabupaten Bandung tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi selain yang di atas tadi, BPBD Kabupaten Bandung memberikan bantuan logistik, obat-obatan dan keperluan lainnya di pengungsian sesuai dengan masyakarat wilayah Kecamatan Baleendah yang diperlukan, meskipun belum secara keseluruhan bantuan ke lokasi yang dapat diberikan" (Ccp, 21/05/2012).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa BPBD Kabupaten Bandung meskipun memiliki kekurangan jumlah aparatur dan alokasi dana, BPDB Kabupaten Bandung tetap melaksanakan tugas mereka sesuai dengan tugas dan fungsi fokok mereka masing-masing. Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil

wawancara bersama Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam san Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bandung yang mengatakan :

> "koordinasi mereka bagus bersama instansi lainnya, meskipun mengenai alokasi dana kurang karena belum rampungnya peraturan daerah mengenai kebencanaan, kita sudah pernah studi banding ke Padang, di Indonesia baru dari daerah yaitu Padang yang mempunyai peraturan daerah, meskipun begitu BPBD Kabupaten Bandung bersama SKPS-SKPD setempat secara maksimal melaksanaan tugas dan fungsi mereka masing-masing" (Ysr, 04/06/2012).

Melihat kondisi tersebut sudah jelas bahwasannya meskipun mempunyai kendala-kedala tersebut BPBD Kabupaten Bandung bersama SKPD-SKPD setempat melaksanakan tugas dan fungsi mereka sesuai dengan tugas dan fungsi mereka masing-masing. Tanggung Jawab BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah dalam melaksanakan fungsi yang diantaranya pengkomandoan, koordinasi dan pelaksanaan penanggulangan bencana banjir sudah cukup baik, tetapi dalam hal pemenuhan bantuan secara keseluruhan belm dapat tercapai karena kurangnya jumlah personil dan jumlah dana yang ada di BPBD Kabupaten Bandung.

4.4.2 Kerja Sama antara perusahaan atau *stakeholder* dengan BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir.

Kerjasama antara perusahaan atau *stakeholder* adalah kemampuan BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam melakukan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait dengan penanggulangan bencana banjir. Penanggulangan bencana banjir merupakan kegiatan yang dalam penanganannya

dilaksanakan oleh pihak pemerintaha, masyarakat dan swasta. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana banjir membutuhkan suatu kerja sama yang solid antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Mewujudkan kerja sama dalam suatu kelompok sangat tidak mudah dilaksanakan karena banyak kendala yang terjadi. Kendala-kendala tersebut disebabkan adanya ketidakserasian dalam kelompok tersebut, misalnya adanya egoisme, keterampilan intrapersonal dan interpersonal, semangat, dan spirit merupakan demensi yang menentukan kerja tim itu tidak dikelola atau dimanfaatkan dnegan semaksimal mungkin.

Penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah oleh BPBD Kabupaten Bandung dalam menjalin kerja sama antara pihak-pihak terkait. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Rekontruksi dan Rehabilitasi Kaupaten Bandung mengatakan :

> selama ini bagus koordinasinya jadi begitu ada banjir langsung berkoordinasi sesuai bidang dan tugas masing-msing. Fungsi Komando, BPBD Kabupaten Bandung membawahi SKPD-SKPD yang lainnya. Perlu di ketahui bahwa BPBD di kepalai okeh seorang Sekda biar koordinasi berjalan lancar otomatis BPBD membawahi instansi-instansi yang lain. Hasil kegiatan instansi-instansi mask dilaporkan kepad BPBD dan dinas-dinas masing" (Snr, 28/05/2012).

Penanggulangan bercana banjir untuk di wilayah Kecamatan Baleendah, BPBD Kabupaten Bandung menjalin kerja sama yang solid artinya bahwa dalam melakukan kerja sama antara BPBD Kabupaten Bandung baik dengan instansi-instansi terkait atau satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Bandung, Masyarakat dan pihak swasta wilayah Kecamatan Baleendah terjalain dengan baik. Pernyataan tersebut dipertajam berdasasarkan hasil wawancara bersama Kepala Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bandung yang mengatakan :

“kerja sama dengan industri yang ada di wilayah Kecamatan Baleendah. Perguruan tinggi, pihak swasta memberikan bantuan melalui BPBD Kabuaten Bandung” (Ccp, 21/05/2012). Terciptanya kerjasama yang baik oleh BPBD Kabupaten Bandung karana keterbukaan dan ramah yang di punyai oleh aparatur BPBD Kabupaten Bandung dalam pengkomandoan, koordinasi serta pelaksanaan penanggulangan bencana banjir, hal tersebut di utarakan oleh TAGANA di wilayah Kecamatan Baleendah yang mengatakan : “tatakrama masih ada, masih bisa dikatakan lumayan, terbuka dan menerika keritikan” (Edi, 26/05/2012).

Sikap dan sifat dari BPBD Kabupaten Bandung yang terbuka ramah dalam bersosialisasi dengan pihak-pihak terkait, di tambah bahwa masyarakat dan pihak swasta juga terkena imbas bencana banjir dan sebagaian besar karyawan industri yang ada di wilayah tersebut masyarakatnya terkena bencana banjir, dan adanya peraturan perundang-undangan yang didalamnya menjelaskan akan kerja sama semua pihak dalam penanggulangan bencana.

Kerjasama dalam penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah yang dikomandoi dan dikoordinasikan oleh BPBD Kabupaten Bandung dalam menjalankan tugas-tugas dan fungsinya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan buku pedoman penanggulangan bencana banjir.

Penanggulangan bencana banjir dilaksanakan secara bersama-sama sesuai dengan tugas masing-masing. Pihak-pihak yang terkait dalam penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah yang berkerja sama dengan

BPBD Kabupaten Bandung sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, buku pedoman penanggulangan bencana banjir 2007 adalah sebagai berikut :

a. BNPB Pusat, menerima laporan harian dari BPBD Kabupaten Bandung melalui komunikasi radio 11.473, 50 Mhz yang memuat : cuaca, kelembaban, suhu rata-rata, arah angin dan kecepatan angin juga bantuan dana, logistik dan pengkordinasian dengan instansi di bawahnya.
b. BPBD Provinsi Jawa Barat, menerima laporan harian dari BPBD Kabupaten Bandung melalui komunikasi radio 11.473, 50 Mhz yang memuat : cuaca, kelembaban, suhu rata-rata, arah angin dan kecepatan angin juga bantuan dana dan logistik.
c. BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Citarum yang saat ini sedang melakukan pengerukan S.Citarum yang mengalami pendangkalan. Mempunyai fungsi sebagai berikut :
    1) Penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
    2) Penyusunan rencana dan pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai;
    3) Pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rudak air pada wilayah sungai;

4) Penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian ijin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;
5) Operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai;
6) Pengelolaan sistem hidrologi;
7) Penyelenggaraan data dan informasi sumber daya air;
8) Fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai;
9) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air; pelaksanaan ketatausahaan Balai Besar Wilayah Sungai.

d. Dinas Kesehatan mempunyai tugas :
   1) Memberikan supervisi, bantuan teknis dan administrasi tentang penanganan kesehatan di lokasi bencana.
   2) Mencatat jumlah masyarakat/korban meninggal, luka-luka dan korban terserang penyakit akibat bencana.
   3) Melakukan upaya penanganan krisis kesehatan yang meliputi : pelayanan kesehatan di Pos Kesehatan, Puskesmas, RS rujukan. dll.

e. Dinas Sosial mempunyai tugas :
   1) Menyiapkan bahan kebutuhan pokok sejak tahap kesiapsiagaan hingga tanggap darurat selesai.
   2) Mendistribusikan bahan kebutuhan pokok bagi korban bencana/pengungsi sampai dengan tanggap darurat selesai.

3) Mengupayakan tersedianya bahan kebutuhan pokok dari berbagai sumber.

f. Dinas Perhubungan mempunyai tugas :

1) Memantau jalur-jalur transportasi yang terhambat akibat banjir dan melaksanakan upaya-upaya alternative transportasi.

2) Menyediakan sarana perhubungan guna membantu upaya penanganan bencana/ kedaruratan.

g. Dinas Perumahan, Penataan Ruang, dan Kebersihan mempunyai tugas :

1) Penyiapan jalur evakuasi dan lokasi penampungan sementara.

2) Penataan tata ruang wilayah di daerah rawan bencana.

h. Dinas Pekerjaan Umum Binamarga mempunyai tugas :

1) Menyediakan peta lokasi rawan banjir.

2) Menyediakan sarana dan prasarana pada tahap kesiapsiagaan dan penanganan bencana/kedaruratan hingga pemulihan darurat.

i. Kesbangpollinmas (Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat) mempunyai tugas memberikan perlindungan dan keamanan terhadap masyarakat yang terkena bencana banjir.

j. Tentara Nasional Indonesia (TNI) mempunyai tugas mengerahkan potensi sumberdaya (peralatan dan personil) TNI untuk melakukan penanganan bencana banjir, termasuk kemungkinan penggunaan helicopter untuk evakuasi dan distribusi bantuan, jika diperlukan.

k. Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas mengendalikan situasi keamanan sejak kesiapsiagaan hingga tanggap darurat selesai.

l. Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung mempunyai tugas sebagai fasilitator dalam melaksanakan penanggulangan bencana banjir.

m. Masyarakat di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung mempunyai tugas :

    1) Ikut berperan serta dalam upaya penggulangan banjir sejak kesiapsiagaan sampai tanggap darurat selesai.
    2) menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dengan tidak membuang sampag sembarangan dan merusak lingkungan.
    3) memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana kepada BPBD Kabupaten Bandung.

n. LSM-LSM yang ada di wilayah Kecamatan Baleendah seperti Baraya Bandung, Garda Caah, FKDM serta PMI (Palang Merah Indonesia), Pramuka,yang mempunyai tugas membantu BPBD Kabupaten Bandung dan instansi-instasi yang terkait dalam penanggulangan bencana banjir dari pra bencana, tanggap darurat hingga pasca bencana.

o. Industri-industri sekitar wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung memberi bantuan baik itu kebutuhan pokok bagi masyarakat dan pembagunan di wilayah Kecamatan Baleendah.

p. Perguruan Tinggi bekerjasama melalui hasil penelitian dari berbagai bidang-bidang keilmuan yang bersangkutan dengan penangulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.

Kerja sama dalam penanggulangan bencana banjir sangat penting, sebab BPBD Kabupaten Bandung tidak semuanya mengetahui akan keperluan-keperluan yang di butuhkan dalam penanggulangan bencana banjir. Berdasarkan hasil wawancara bahwa BPBD Kabupaten bandung tidak berdiri sendiri dalam penanggulangannya seperti untuk merawat orang yang sakit BPBD Kabupaten Bandung berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, untuk rekonstruksi bangunan atau rumah berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Penataan Ruang dan Kebersihan untuk mengenai jenis bangunan yang cocok di bangun di wilayah yang sering terkena bencana banjir. Kegiatan penanggulangan bencana banjir tersebut bertugas sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing.

BPBD Kabupaten Bandung selaku instansi yang melakukan fungsi koordinasi, komandao dan pelaksanaan dalam penangulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah, berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi mengatakan :

> “selama ini bagus koordinasinya jadi begitu ada banjir langsung berkoordinasi sesuai bidang dan tugas masing-msing. Fungsi Komando, BPBD Kabupaten Bandung membawahi SKPD-SKPD yang lainnya. Perlu di ketahui bahwa BPBD di kepalai okeh seorang Sekda biar koordinasi berjalan lancar otomatis BPBD membawahi instansi-instansi yang lain. Hasil kegiatan instansi-instansi mask dilaporkan kepad BPBD dan dinas-dinas masing” (Snr, 28/05/2012).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut meskipun instansi-instansi berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, hasil laporan kegiatan penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah di laporkan kepada BPBD Kabupaten Bandung tetapi pertanggung jawaban instansi-instansi atau SKPD Kabupaten Bandung tetap bertanggung jawab terhadap instansi atau SKPD masing-masing.

Kerjasama BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir sudah cukup baik. Terlaksanannya kerjasama tersebut dalam hal ini dengan adanya koordinasi baik instansi tingak pusat, provinsi, kabupaten, perguruan tinggi, LSM dan Masyarakat seba hal tersebut merupakan suatu kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan buku pedoman penanggulangan bencana banjir.

4.5 Akuntabilitas BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir.

Akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukan seberapa besar tingkat kesesuaian kegiatan BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir. Kesesuaian kegiatan peanggulangan khususnya bencana banjir agar dapat terciptanya pembangunan lingkungan di wilayah Kabupaten Bandung umumnya dan khususnya di wilayah Kecamatan Baleendah yang sangat rentan akan berbagai bencana alam salah satunya bencana banjir yang terjadi baik akibat faktor alam juga faktor manusia. Terciptanya

pembangunan lingkungan khususnya sungai sangat penting terutama di wilayah Kecamatan Baleendah yang sering mengalami bencana banjir. Kondisi tersebut merupakan suatu kewajiban akan terciptanya lingkungan atau wilayah yang bebas dari bencana banjir.

Menciptakan lingkungan yang bebas dari bencana banjir perlu adanya suatu kegiatan yang diarahkan agar wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Kegiatan untuk menghadapi bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah melalui penanggulangan bencana oleh BPBD Kabupaten Bandung. Kegiatan penanggulangan bencana banjir tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) akan adanya penanggulangan bencana banjir yang diharapkan pada tahun 2025, lokasi-lokasi atau wilayah-wilayah genangan tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan.

Rencana Kabupaten Bandung tersebut diharapkan bahwa masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Baleendah, umumnya masyarakat kabupaten Bandung dapat menikmati lingkungan yang nyaman bebas dari bencana banjir. Rencana Kabupaten Bandung tersebut dalam menciptakan lingkungan tersebut, melalui BPBD Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir. Kegiatan penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah tentunya membutuhkan suatu pelayanan yang adil dan merata serta menyeruruh terhadap masyarakat yang terkena bencana banjir.

Mewujudkan pelayanan yang adil, merata dan menyeluruh dalam kegiatan penanggulangan bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Bandung di wilayah Kecamatan Baleendah diperlukan suatu pencapaian hasil yang sudah

direncanakan dan dilaksanakan sebelumnya sebagai suatu acuan untuk kedepannya. Kegiatan penanggulangan bencana banjir tersebut berhasil tidaknya dapat dilihat dari indikator akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan perwujudan pertanggung jawaban seseorang atau organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasasi, dalam rangka pencapain tujuan. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Mewujudkan akuntabilitas yang baik merupakan suatu keharusan yang wajib terlaksana dalam hal ini oleh BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana. Mewujudkan akuntabilitas tersebut melalui peningkatan akan kinerja BPBD Kabupaten Bandung di wilayah Kecamatan Baleendah dalam penanggulangan bencana banjir agar semua tujuan atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya dapat berjalan dengan semestinya.

Akuntabilitas BPBD Kabupaten Bandung di wilayah Kecamatan Baleendah dalam penanggulangan bencana banjir dapat dikatakan cukup baik kinerjanya hal tersebut dengan tercapainya sasaran dari kegiatan-kegiatan atau program-program BPBD Kabupaten Bandung bersama pihak-pihak terkait dan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pelaksanaan penanggulangan bencana banjir tersebut. BPBD Kabupaten Bandung di wilayah Kecamatan Baleendah dalam penanggulangan bencana banjir dapat dilihat dari *Legal Accountability*, *Program Accountability*, *Proses Accountability dan Outcome Accountability*, sebagai berikut :

4.5.1 *Legal Accountability* BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir.

Legal Accountability adalah sejauh mana kesesuaian dengan Undang-undang maupun peraturan yang dapat di jalankan oleh BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir. Kebijakan atau peraturan perundang-undangan merupakan serangkaian instruksi yang didalamnya memuat akan arahan atau prosedur untuk melaksanakan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut agar berjalan baik.

BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penangulangan bencana banjir tentunya mempunyai kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang instansi BPBD Kabupaten Bandung yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan dan struktur organisasi BPBD Kabupaten Bandung dalam menjalankan tugasnya yakni penanggulangan bencana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung. Pelaksanan penanggulangan bencana banjir BPBD Kabupaten Bandung mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang didalamnya memuat akan prosedur penanggulangan bencana serta Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan buku pedoman penanggulangan bencana banjir.

Melihat akan adanya peraturan penanggulangan bencana banjir tentunya pola penanggulangan banjir lebih jelas akan tugas pokok dan fungsi dari BPBD

Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bandung beliau mengatakan :

> "tidak sesuai dengan perudang-undangan nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, karena bukan bencana, tapi kita lebih melihat kepada sisi kemanusiaannya, yang sesuai dengan UU itu, kalo BE sepanjang tahun, karean di UU tangani 7 hari selesai, kalo BE 7 hari besok lusanya bisa terjadi lagi, tapi tetap di laksanakan" (Ccp, 21/05/2012).

Pola penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah menurutnya penanggulangan bencana banjir tersebut bukan dikatakan bencana melaikan musibah, karena di dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, penanganan bencana 7 hari selesai tetapi banjir di Baleendah besoknya bisa terjadi lagi, meskipun demikian BPBD Kabupaten Bandung tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dan tetap mengacu pada UU tersebut. Pernyatan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara bersama instansi terkait yakni Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Dinas Sosial Kabuaten Bandung yang mengatakan :

> "se-Indonesia ada di kota Padang yang ada perdanya. UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana memahami secara umum, tetapi diharapkan setiap derah mempunyai untuk penguatan penanggulangan becana. Antara teori dan praktek kadang harus disesuaikan, tetapi tetap hars menyesuaikan dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana" (Ysr, 04/06/2012).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa dalam penangulangan bencana di Kabupaten Bandung, BPBD Kabupaten Bandung mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang didalamnya memuat akan prosedur penanggulangan bencana, hal tersebut sedikit mangalami hambatan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir sebab

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang didalamnya memuat akan prosedur penanggulangan bencana nasional atau keseluruhan menyebabkan pola penanggulangannya umum tidak khusus akan untuk daerah dalam penanggulangan bencananya.

Penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah masih mempunyai hambatan dalam penanggulangannya dikarenakan belum adanya payung hukum atau peraturan daerah di Kabupaten Bandung tentang penanggulangan bencana banjir. Berdasarkan hasil wawancara bersama TAGANA di wilayah Kecamatan Baleendah yang mengatakan : ” mengenai peraturan belum ada masih dalam proses penggojlokan, jadi anggaran mejadi tersendat sehingga kurang kerakomodir dari dana yang ada” (Edi, 26/05/2012).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan tidak adanya peraturan daerah mengakibatkan pola penanggulangan bencana banjir penanganannya sedikit terhambat seperti kurangnya dana penanggulangan bencana banjir. Bencana banjir yang sering terjadi di wilayah Kecamatan Baleendah apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana masih umum sedangkan bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah sering terjadi. Kondisi tersebut tentunya membutuhkan jumlah dana, jumlah peralatan, jumlah personil yang membutuhkan kebijakan atau peraturan daerah yang khusus dalam penanggulangan bencana banjir yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di Kabupaten Bandung.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bandung beliau mengatakan :

> “meskipun Kabupaten Bandung belum memiliki peraturan daerah mengenai penanggulangan bencana karena masih dalam proses, pihak BPBD Kabupaten Bandung bersama pihak-pihak terkait tetap melaksanaan kegiatan penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah sesuai dengan peraturan yang ada meskipun ada halangan tetapi BPBD Kabupaten Bandung secara maksimal melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah. Kegiatan penanggulangan bencana banjir apabila tidak dilaksanakan dengan baik pihak BPBD Kabupaten Bandung mengetahui akan konsekuensi apabila tidak melaksanakan tugas mereka sesuai dengan peraturan yang ada” (Ccp, 21/05/2012).

Berdasarkan wawancara tersebut pihak BPBD Kabupaten bandung bersama pihak-pihak terkait tetap melaksanakan penanggulangan bencana banjir sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, karena bila tidak tentunya dapat kena sangsi baik itu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dan peraturan perundang-undangan yang ada seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana di dalamnya memuat akan ketentuan pidana mulai dari pidana penjara paling singkat 3 tahun atau paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp. 2000.000.000 (dua miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Sangsi di dalam Undang-undang tersebut bagi pihak-pihak yang sengaja sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian harta benda atau barang, matinya orang dan pihak yang menghambat kemudahan akses dalam penanggulangan bencana serta orang yang sengaja menyalah gunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana.

Legal Accountability BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir, meskipun belum memiliki peraturan daerah mengenai penanggulangan bencana. Pola penanggulangan bencana banjir tersebut penanganannya sedikit terhambat seperti kurangnya dana penanggulangan bencana banjir, tetapi BPBD Kabupaten Bandung bersama pihak-pihak terkait tetap melaksanakan pelaksanan penanggulangan secara maksimal karena apabila tidak terlaksana sama sekali pidana dan denda yang sangat tegas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

4.5.2 *Program Accountability* BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir.

Program Accountability adalah akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana pemerintah mencapai program-program yang telah ditetapkan. Program merupakan rangangan yang didalamnya berisikan asas serta usaha yang akan dijalankan. BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam menjalankan tugas penanggulangan bencana banjir mempunyai program-program. Program-program BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah adalah pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh SKPD Kabupaten Bandung dan LSM-LSM seperti Baraya Bandung, Garda Caah, FKDM dan serta masyarakat di wilayah Kecamatan Baleendah yang berperan dalam kegiatan penanggulangan bencana banjir.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bandung beliau mengatakan :

> "kita berupaya tahun dari ke tahun terus meningkat dengan adanya Pelatihan-pelatihan dan pendidikan, baik itu aparatur, LSM dan masyarakat serta adanya sosialisasi di sipatahunan Kecamatan Baleendah" (Pdn, 28/05/2012).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ini dimaksudkan agar baik aparatur pemerintahan Kabupaten Bandung, dapat bekerja secara profesional dan ahli dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana banjir, sedangkan LSM atau relawan merupakan *partner* dari BPBD Kabupaten Bandung dalam membantu dalam kegiatan penanggulangan bencana sehingga memahami akan proses kegiatan tersebut, sedangkan masyarakat diharapkan agar memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika bencana banjir datang.

Program lainnya adalah Program Perbaikan Perbaikan perumahan akibat bencana alam sosial dengan adanya Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam serta Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam yang terdiri dari Kegiatan Pencegahan Dini dan Penanggulangan dan Kegiatan Peningkatan Penanggulangan Bencana Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan beliau mengatakan

> "bahwasannnya program untuk pra bencana belum ada program yang dijalankan hal tersebut disebabkan oleh kurangnya dana di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, tetapi pihak BPBD Kabupaten Bandung tetap melakukan peringatan dini melalui koordinasi dengan LSM-LSM setempat lewat radio atau via telepon atau SMS (*Sort Message Service*) dalam penanggulangan bencana banjir" (Pdn, 28/05/2012).

Berdasarkan hasil wawancara BPBD Kabupaten Bandung pada bidang Pra bencana belm ada alokasi dana tambahan sehingga pelaksanaan prohram-program tersebut sedikit terhambat, tetapi meskipun program penanggulangan bencana banjir meskipun belum berjalan dengan lancar tetapi pihak BPBD Kabupaten Bandung secara maksimal guna meminimalisir kekurangan tersebut. Program yang lebih besarnya dalam penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah adalah berdasarkan wawancara bersama Kepala Rehabilitasi dan Rekontruksi beliau mengatakan bahwa :

> "kita bersama pemerintah daerah pembuatan *selter* (Tempat pengungsian terpadu) yang berada di wilayah cangkuang wetan di sebuah lapangan dengan luas 6000m^2 yang didanai APBN tahun anggaran 2011 dan *selter* Andir yang akan dibangun dengan luas 6.400 m^2 dengan menggunakan dana APBD Jawa Barat tahun anggaran 2012. *Selter* tesebut di buat khusus sebagai tempat penungsian terpadu yang mempunyai tenda-tenda pengungsian yang dilengkapi oleh dapur umum, air bersih yang masing-masing menampung 900 jiwa, tetapi ini hanya penanganan banjir jangka pendek" (Snr, 28/05/2012).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut pembuatan *Selter* yang ada si wilayah Kecamatan Cangkuang Wetan dan yang terbaru akan di bangun di wilayah Kelurahan Andir Kecamatan Baleendah, diharapakan percepat pembangunanya, karena becana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah sangat sering terjadi. Pembuatan *Selter* bertujuan agar memudahkan dalam penanganan terhadap korban banjir sehingga di harapkan kebutuhan-kebutuhannya dapat terpenuhi.

Sasaran-sasaran lainnya yang dikategorikan berhasil dari program-program lainnya berdasarkan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) BPBD Kabupaten Bandung tahun 2011 sebagai berikut :

1. Tersedianya peta mitigasi bencana di 16 Kecamatan dalam rangka peningkatan pengurangan resiko bencana di Kabupaten Bandung
2. Meningkatkan pembinaan tehnik terhadap masyarakat dalam rangka peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengantisipasi bencana di setiap wilayah masing-masing
3. Terwujudnya koordinasi di bidang tanggap darurat, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggapdarurat penanggulangan bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana. dengan unit kerja/ instansi/lembaga lain.

Pencapaian program-program yang di laksanakan oleh BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir ke depannya tentunya di harapkan membawa dampak positif yang masksimal bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Baleendah. Faktor dari belum rampungnya peraturan daerah tentang kebencanaan dan kurangnya jumlah aparatur BPBD Kabupaten Bandung serta kurangnya alokasi dana untuk kebencanaan juga di harapkan dapat diperbaiki agar program-program yang ada di BPBD Kabupaten Bandung dapat produktif atau lebih banyak lagi program-program yang dihasilkan BPBD Kabupaten Bandung guna mewujudkan visi dari BPBD Kabupaten Bandung yakni “Terwujudnya Kabuaten Bandung Siaga dan Sabilulungan Dalam Menghadapi Bencana”.

Program Accountability BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir program-program yang dijalankan berjalan cukup baik. Gambaran tersebut dengan berjalannya kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah dari adanya diklat, peringatan dini dan penanggulangan bencana dan rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana serta pembuatan *selter-selter* tempat pengungsian terpadu.

4.5.3 *Proses Accountability* BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir.

Proses Accountability merupakan akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana pemerintah mengolah dan memberdayakan sumber-sumber potensi daerah secara ekonomi dan efisien. Proses akuntabilitas dalam penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah oleh BPBD Kabupaten Bandung, sudah berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bandung beliau mengatakan :

> "potensi gedung swasta, pemerintah, masyarakat ada FKDM, Baraya Bandung, PSDA, Garda Caah, LSM kita selalu pake mereka, meraka itulah yang menyebar info dari BPBD, kalo membuka posko yang menspesialisasikan komunikasi ada, sebab hanya ada 7 orang di bidang tanggap darurat. mobil saja di bawa relawan.Orang BE tuh *care*. ujan 3 jam banjir terjadi" (Ccp, 21/05/2012).

Berdasarkan hal tersebut bahwa BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penangulangan bencana banjir memanfatkan dan memberdayaakan relawan-relawan atau LSM-LSM yang ada di wilayah

Kecamatan Baleendah. LSM-LSM yang berdayakan di wilayah Kecamatan Baleedah diantaranya Baraya Bandung, Garda Caah, FKDM dan sebagainya, meraka yang menyebarkan informasi mengenai kebencanaan untuk wilayah Kecamatan Baleendah mulai dari Pra Bencana, Tanggap darurat sampai pasca bencana, bahkan peralatan operasional BPBD Kabupaten Bandung seperti mobil operasional di pergunakan oleh relawan untuk membantu tugas dari BPBD Kabupaten Bandung

Memberdayakan dan memanfatkan potensi di wilayah Kecamatan Baleendah menurut BPBD Kabupaten Bandung tidak sulit sebab warga masyarakat di wilayah Kecamatan Baleendah secara umum perhatian dan ramah terhadap aparatur dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir. Pemanfataan potensi lainnya selain SDM di wilayah Kecamatan Baleendah adalah gedung-gedung swasta dan gedung pemerintahan sebagai tempat pengungsian sementara yang diantaranya, Gedung Juang Baleendah, Gedung DPC PDIP Baleendah, Gor Baleendah dan Gedung Kwarcab Pramuka.

Pernyataan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bandung tadi sama halnya dengan pernyataan dari masyarakat TAGANA di wilayah Kecamatan Baleendah yang mengatakan :

> "pemanfaatan potendi di sini, Ya... relawan dan masyarakat di sekitar lokasi bencana. Masyarakat sudah menjadi masyarakat mandiri dengan menyiapkan peralatan sendiri seperti ban, perahu, tambang" (Frs, 13/05/2012).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut sangat jelas akan pemanfatan potensi yang ada di daerah bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah, Relawan atau LSM dam masyarakat di berdayakan yang sebelumnya sebagian ada

yang dididik dan dilatih dan sosialisasi menegnai penanggulangan bencana banjir sehingga meraka dapat membantu diri mereka sendiri dan juga membantu meminimalisir akan kekurangan yang BPBD Kabupaten Bandung seperti jumlah alokasi dana, jumlah personil aparatur dan jumlah logistik.

Potensi lainnya adalah adanya pembangunan tanggul di pinggir sungai Citarum yang sebagiannya merupakan sumbangan dari pihak industri setempat, hal tersebut berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD Kabupaten Bandung beliau mengatakan : "adanya kerjasama dengan industri dengan membantu membuat tangul tetapi hrs berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait biar jelas" (Snr, 28/05/2012). Pemanfaatan potensi tersebut terutama pihak swasta tentunya sangat membantu apalagi di wilayah Kecamatan Baleendah merupakan kawasan yang bisa di bilang kawasan industri-industri.

Industri-industri yang ada di wilayah Sungai Citarum turut dalam pendangkalan sungai melalui pembuangan limbah mereka ke sungai Citarum dan anak sungai seperti Cisangkuy dan anak lainnya, sehingga turut dalam terjadinya bencana banjir, selain masalah pembuangan sampah ke sungai oleh masyarakat. Faktor-faktor tersebut tentunya mewajibkan pihak industri untuk memberikan bantuan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Baleendah yang terkena dampak bencana banjir tentunya melalui BPBD Kabupaten Bandung sebagai instansi yang mempunyai kewenangan dalam kegiatan penanggulanagn bencana banjir. prosedur tersebut biar jelas dan supaya dalam pemberian bantuannya tetap

sasaran dan merata kepada korban yang memang berhak mendapatkan bantuan-bantuan tersebut.

Pembagunan lingkungan juga merupakan kewajiaban baik itu pemerintah, masyarakat dan swasta, seperti pembuatan tanggung-tanggul di pinggir sungai Citarum untuk membendung luaapan air, dan pengerukan sungai meskipun bukan kewenangan BPBD Kabupaten Bandung, tetapi di sini harus ada kerjasama yang solid. Pihak swasta yang turut membantu melancarkan pengerukan sungai Citarum bantuan tersebut bisa materil maupun finansial dan masyarakata juga untuk tidak membuang sampah ke dalam sungai yang dapat memicu pendangkalan.

Pemanfaatan potensi baik oleh Pemerintah, Swata dan masyarakat ada di wilayah Kecamatan Baeleendah tentunya dapat memudahkan BPBD Kabupaten Bandung dalam melaksanakan berbagai kegiatan penanggulangan bencana banjir, paling tidak untuk meminimalisir kekurangan yang dimiliki BPBD Kabupaten Bandung seperti hanya masyarakat wilayah Kecamatan Baleendah yang tahu akan rincian daerahnya, jumlah personil dan dana sehingga pelaksanaan penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Balendah dapat berjalan secara maksimal, apalagi dengan adanya perbaikan lingkungan di wilayah sungai citarum kedepannya wilayah Kecamatan Baleendah terbebas dari bencana banjir.

Melihat kondisi-kondisi tersebut bahwa BPBD Kabupaten Bandung dalam menjalin kemitraan dengan pihak-pihak seperti masyarakat LSM, swasta serta perguruan tinggi memaksimalkan pemanfaatan potensi yang ada di wilayah Kecamatan Baleendah dalam penanggulangan bencana banjir sudah berjalan

dengan baik. *Proses Accountability* BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir sudah berjalan baik dengan adanya pemberdayaan LSM-LSM dan masyarakat di wilayah kecamatan Baleendah serta pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir.

4.5.4 *Outcome Accountability* BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir.

Outcome Accountability adalah akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana efektifvitas hasil atau manfaat yang dapat diperoleh atau dirasakan oleh masyarakat. Setiap kegiatan atau program yang dilaksanakan pemerintah pasti ada manfaat yang dihasilkan dirasakan oleh masyarakat.

Kegiatan penanggulangan bencana banjir oleh BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah yang berkoordinasi dalam pelaksanannya bersama istansi-instansi pemerintahan atau SKPD Kabupaten Bandung bersama LSM dan masyarakat, berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logsitik BPBD Kabupaten Bandung beliau mengatakan :

> "merasa ada yang memperhatikan, bisa ada yang diteriakin minimal mereka tidak terlalu lapar, ketika terjadi banjir BPBD menyiapkan kebutuhan. Minimal mereka ada yang memprotek mereka, mengenai manfaat tidaknya tergantung karean kepuasan masyarakat relatif ada yang kebagian banyak bilang bagus, ada yang kebagian sedikit di bilang jelek, namanya orang pengennya lebih, di tambah karena kebutuhan terbatas akan keperluannya" (Ccp, 21/05/2012).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut manfaat yang bisa di rasakan oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Baleendah dalam penanggulangan becana banjir bahwa dengan adanya penanggulangan bencana banjir minimal mereka ada yang memperhatikan, *care* terhadap meraka, adanya bantuan-bantuan baik seperti yang ada pada tabel 4.3 mengenai kebutuhan stok logistik untuk penanggulangan bencana banjir. Pernyataan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logsitik BPBD Kabupaten Bandung tersebut hampir sama halnya dengan pernyataan masyarakat kampung Cieunteung Kelurahan Baleendah yang berpendapat : "manfaat penanggulanp sepenuhny kadang ada manfaatnya, seperti bantuan, bantuan, yang belm sepenuhnya maksimal" (Mat 13/05/2012). Melihat kondisi tersebut memang benar adanya bahwa manfaat yang dirasakan masyarakat memang ada, tetapi untuk bantuan belum menyelururuh karena faktor alokasi dana yang menyebabkan pasokan jumlah bantuan belum memenuhi bagi korban bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.

Manfaat lainnya yang dirasakan masyarakat adalah adanya pemberian uang tunai untuk memperbaiki rumah yang terkena dampak bencana banjir. Berdasarkan hasil wawancara bersama masyarakat kampung Cigosol Kelurahan Andir beliau mengatakan : "rekontruksi belum ada untuk tahun 2012, tetapi pernah diberi 150 rebu- 1 juta pada zaman pak obar, kalo sekarang belum" (Frs, 13/05/2012). Melihat kondisi tersebut memang bantuan untuk rekontruksi pada tahun-tahun sebelumnya ada, tetapi untuk sekarang belum ada karena, konsentrasi ada perbaikan lingkungan di wilayah sungai Citarum yakni pengerukan. Alasan tersebut berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Rekontruksi dan

rehabilitasi BPBD Kabupaten Bandung beliau mengatakan : “ untuk Baleendah percuma adanya rekonstruksi rumah karena banjir terus-terusan, pertama benahi dulu sungai agar anggaran dapat terserap dengan baik dan agar tidak buang-buang biaya” (Snr, 28/05/2012).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut ada benarnya apabila rekontruksi rumah warga yang ada di wilayah Kecamatan Baleendah tidak di dahulukan perbaikan sungai maka bola terjadi banjir, perbaiakn rumah tersebut tentunya sia-sia dan akan rusak kembali, sehingga sesuai wawancara tadi agar biaya yang dikeluarkan maksimal digunakannya menunggu perbaikan atau pengerukan sungai Citaurm.

Manfaat yang di dapat dari penanggulangan bencana banjir lainya adalah dipertegas oleh pendapat masyarakat yang terkena bencana banjir yakni Kampung Ciuenteung, Kampung Cigosol, Kampung Jambatan, Kampung Ciputat dan Kampung Kulalet yang hasil wawancaranya di gabungkan menghasilkan kesimpulan mereka menerima bantuan seperti kebutuhan pokok, peralatan, dan kebutuhan lainnya untuk keperluan ketika bencana terjadi hingga selesai. Bantuan yang diberikan oleh BPBD Kabupaten Bandung meskipun kurang menyeluruh atau maksimal tetapi mereka memahami akan hal tersebut.

Daerah di wilayah Kecamatan Baleendah sudah sering terjadi bencana banjir, tetapi masyarakat sekitar tentunya ke depannya agar bantuan yang diberikan dalam penanggulangan bencana banjir ketika sedang terjadinya bencana merata secara keseluruhan dan bantuan untuk rekontruksi bangunan-bangunan yang rusak, meskipun menurut masyarakat pernah menerima, tetapi untuk

sekarang ini mereka belum menerima bantuan lagi untuk merekontruksi dan merehabilitasi rumah mereka. Manfaat yang diperoleh oleh masyarakat berdasarkan hasil wawancara bersama masyarakat Kampung Cigosol Kelurahan andir beliau mengatakan : selain adanya bantuan-bantuan logistik dan kebutuhan pokok lainnya, adanya pendidikan dan latihan serta sosialisasi yang diberikan oleh BPBD Kabupaten Bandung kepada masyarakat wilayah Kecamatan Baleendah" (Frs, 13/05/2012).

Pemberian pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi mengenai penanggulangan bencana banjir menjadikan pemahaman warga masyarakat paling tidak mengerti akan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghadapi atau menghindari bencana banjir, serta pemahanan terhadap pentingnya melestarikan lingkungan di wilayah Kecamatan Baleendah khususnya wilayah DAS. Pemberian pendidikan dan pelatihan tentunya sesuai dengan yang ada pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Banjir yang terdapat pada pasal 26 butir b yang isinya : Setiap orang berhak: mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Melihat peraturan perundang-undangan tersebut berarti BPBD Kabupaten Bandung sudah melaksanakan kewajibannya dengan melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap masyarakat di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.

Outcome Accountability BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan bencana banjir sudah berjalan cukup baik, dengan adanya bantuan-bantuan dari prabencana hingga pasca

bencana banjir, pembuatan tanggul, pengerukan sungai Citarum oleh pihak-pihak terkait, meskipun tidak secara maksimal tetapi masyarakat memahami dan menyadari akan keterbatasan dari BPBD Kabupaten Bandung beserta pihak-pihak terkait. Kondisi tersebut karena bencana banjir di wilayah Kecamatan Baleendah sudah sering terjadi tetapi ke depannya minimal dapat meminimasilir kerugian yang diakibatkan bencana banjir.